



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga sekaligus mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- b. bahwa sesuai Misi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka kebijakan Pembangunan Keluarga di Kota Blitar

diarahkan untuk menekan masalah-masalah sosial yang dapat menimpa keluarga dan penguatan ketahanan keluarga melalui peneguhan pendidikan dari, oleh dan untuk keluarga yang diwujudkan dalam suatu program strategis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga Tahun 2019-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA TAHUN 2019-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang ditetapkan dan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kota Blitar
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
8. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat diwilayah Kota Blitar
9. Masalah Sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
10. Penyakit sosial adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang.
11. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orangtua sebagai tugas dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga.
12. Dokumen Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga 2019-2021 adalah dokumen yang menyajikan program/kegiatan guna membentengi keluarga masyarakat Kota Blitar baik itu bagi bapak, ibu, anak dari kondisi yang merusak moral maupun kesehatan untuk kurun waktu Tahun 2019-2021.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan guna membentengi keluarga masyarakat Kota Blitar dari kondisi yang merusak moral maupun kesehatan.

BAB III. PROFIL KOTA BLITAR

BAB IV. ANALISA MASALAH KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BLITAR

BAB V. RENCANA AKSI/ STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG
KELUARGA

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan dan mengevaluasi kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terkait dengan didukung pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 29 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 25 Januari 2019

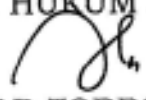
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


AHMAD TOBRONI,SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penyakit sosial berupa perilaku amoral dan aksi intoleransi merebak secara besar-besaran atau disebut masif seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pencabulan, pembegalan hingga pembunuhan. Kegiatan ini dari kekerasan perilaku personal hingga atas nama kelompok dengan basis ideologinya yang bervariasi. Bahkan saat ini telah merebak fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang sangat meresahkan masyarakat. LGBT merupakan penyakit sosial sekaligus penyakit jiwa yang sangat berbahaya karena pelaku cenderung mempengaruhi generasi muda (terutama pelajar dan anak-anak) sebagai korbannya. Implikasi serius yang saat ini dapat kita amati adalah salah satunya meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS dengan usia terinfeksi adalah masa anak-anak (usia di bawah 18 tahun).

Kasus penderita HIV/AIDS di Kota Blitar semakin meningkat setiap tahunnya, sampai dengan Tahun 2017 total kasus adalah 134 kasus dengan jumlah 43 dari kalangan perempuan dan 91 laki-laki. Yang perlu menjadi kewaspadaan adalah jumlah terbanyak pada kisaran umur 21-30 tahun yang dapat dianalisa bahwa ketika terinfeksi pada kurun waktu 5-10 tahun sebelumnya, yaitu pada umur 11-20 tahun. Hal ini memerlukan perhatian kita karena Analisa umur terinfeksi pada 11-20 tahun merupakan umur pada masa sekolah dasar sampai dengan masa perkuliahan. Yang menjadi perhatian lainnya adalah bahwa masa depan negara ada di tangan anak-anak kita.

Masalah-masalah sosial diindikasikan penyebabnya salah satunya adalah ketahanan keluarga yang kurang kuat seperti kemiskinan akibat penyakit yang

serius antara lain HIV/AIDS, kemiskinan akibat pernikahan dini yang diakibatkan adanya pergaulan bebas karena pengaruh sosial media dan kurangnya perhatian dari keluarga, meningkatnya pecandu narkoba akibat salah pergaulan dan kurangnya benteng keimanan, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, meningkatnya anak-anak yang kehilangan kasih sayang orangtua karena meningkatnya angka perceraian dan lain sebagainya.

Untuk itu dalam usaha menekan beberapa masalah-masalah sosial tersebut di atas, peran penting keluarga sangatlah dibutuhkan karena dengan usaha meneguhkan pendidikan keluarga sebagai benteng utama bangsa.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga adalah Untuk menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan guna membentengi keluarga masyarakat Kota Blitar baik itu bagi bapak, ibu, anak dari kondisi yang merusak moral maupun kesehatan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga adalah program/kegiatan guna membentengi keluarga masyarakat Kota Blitar baik itu bagi bapak, ibu, anak dari kondisi yang merusak moral maupun kesehatan untuk kurun waktu Tahun 2019-2021.

D. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga 2019-2021.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam dokumen Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga adalah:

- a. Melakukan inventarisasi factor-faktor yang mengganggu ketahanan keluarga di Kota Blitar baik itu dari ayah, ibu, anak.

- b. Melakukan inventarisasi dampak akibat terganggunya ketahanan keluarga di Kota Blitar.
- c. Menyusun strategi dan kebijakan melalui program/kegiatan di Perangkat Daerah maupun stakeholders yang terkait dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagai benteng kekuatan masyarakat Kota Blitar terhadap rongrongan masalah sosial Tahun 2019 - 2021.

F. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
- 5) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, didalamnya mengatur hak-hak anak dalam pencatatan sipil, misalnya: Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak;
- 7) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar
- 8) Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Kota Layak Anak Kota Blitar;
- 9) Keputusan Walikota Nomor : 188/192/HK/410.010.2/2011 Tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar, merupakan komisi untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan, perdagangan anak (trafficking) dan eksploitasi terhadap perempuan dan

anak serta meminta saran pertimbangan serta rekomendasi kepada semua pihak dan atau para ahli untuk melaksanakan tindak rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi agar tercipta rasa aman bagi korban, pelapor dan saksi;

- 10) Surat Keputusan Walikota Blitar No. 188/358/HK/410.010.2/2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar ;
- 11) Surat Keputusan Walikota Nomor 188/556/HK/410.010.2/2015 Tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

BAB II

TINJAUAN TEORI

a) *Pengertian Pendidikan Keluarga*

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orangtua sebagai tugas dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga.

Menurut Elly Risman (2014), pendidikan keluarga menjadi sangat penting karena:

1. Keluarga merupakan lembaga pendidikan paling alamiah;
2. Prosesnya tanpa didramatisasi atau didesain secara rumit sebagaimana terjadi pada lembaga pendidikan profesional;
3. Materinya meliputi seluruh bidang kehidupan, metodenya sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan evaluasinya dilakukan secara langsung oleh anggota keluarga;
4. Dalam keluarga juga tak mungkin terdapat komersialisasi jasa pendidikan. Para orangtua memberikan pendidikan dan fasilitas pendidikan tentulah tak mengharapkan imbalan materi, selain didorong kewajiban moral.

b) *Pengertian Keluarga Ideal*

Keluarga yang ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa, mawadah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang)).

Keharmonisan adalah keadaan yang selaras, serasi, atau cocok. Keharmonisan adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah dan kasih sayang baik terhadap istri dan anak dan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan

dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

c) *Ciri-ciri Keluarga Ideal*

Menurut pakar mengenai permasalahan rumah tangga, maka keluarga bahagia adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan YME
- b. Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat.
- c. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- d. Cukup sandang, pangan, papan.

d) *Ketahanan keluarga*

Adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi keluarga di kawasan kumuh untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ketahanan keluarga terdiri dari ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologi (Sunarti, 2001). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga diantaranya lama pendidikan, lama menikah, pendapatan per kapita, pendidikan isteri, pendidikan suami, besar keluarga, kesiapan umur dalam menikah, dukungan sosial, kualitas relasi gender, manajemen sumber daya keluarga, produktifitas pasangan suami isteri dalam mencari nafkah (Fitriani 2010, Ginanjarsari 2010, Herawati 2011, Sholihah 2013).

e) *Hal-hal yang perlu dilakukan di keluarga*

Keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan, yang harus dilakukan adalah:

1. Bagi orangtua (termasuk anggota keluarga yang lain) harus memastikan anak-anaknya mengenal dan memahami dasar-dasar agama. Orangtua mesti menjadi model bagi anak soal pengetahuan dan pengamalan agama. Bukan saatnya bagi orangtua untuk malas dalam mendalami berbagai sumber pengetahuan, terutama tentang agama. Lebih riil, orangtua "wajib" menyediakan waktu khusus untuk membaca, mendalami, dan mengkaji

berbagai sumber bacaan; baik dasar-dasar agama, maupun pengetahuan lain yang menunjang berjalannya pendidikan keluarga.

2. Orangtua harus berkomunikasi, membantu dan membimbing anak-anaknya tentang aktivitas, pergaulan dan dalam menentukan cita-cita serta misi hidupnya yang luhur dan mulia. Di samping itu, orangtua juga perlu mengarahkan anak-anaknya agar ikut aktif dalam organisasi yang baik dan teratur sehingga membentuk kepribadian dan wawasannya menjadi semakin luas dan terjaga dari berbagai hal buruk. Pada era teknologi ini, orangtua tidak boleh merasa bodoh, dengan anak-anaknya yang aktif berorganisasi namun kerap meninggalkan shalat, suka berpacaran, suka "keluyuran" pada malam hari dan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang kurang berguna. Orangtua perlu mengecek HP, facebook, twitter, e-mail dan media lain yang dimiliki anak-anaknya secara rutin, karena alat komunikasi dan media (terutama media sosial) turut mengambil peran dalam membentuk, merubah dan mengarahkan perilaku anak-anak baik itu pengaruh yang baik maupun buruk.

f) *Karakter generasi ideal sebagai generasi Masa Depan Bangsa*

Generasi yang ideal yang diharapkan menurut *Ellen G. White* dalam bukunya *Education* adalah yang memiliki integritas, prinsip yang teguh, selalu mengarah kepada kebenaran serta tidak dapat digoyahkan. Sedangkan dalam rangka mewujudkan hal tersebut, menurut *Arya Febriadi* dalam blognya terkait *Cara Menjadi Generasi Muda Yang Baik dan Ideal*, pemerintah perlu melakukan:

1. Mendorong pelibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.
2. Mengembangkan kemampuan wirausaha
3. Memaksimalkan peran generasi muda dalam mengatasi hambatan-hambatan budaya, etnis, dan ras.
4. Memberdayakan generasi muda dalam pembangunan.
5. Menempatkan generasi muda dalam visi pembangunan.

Pemerintah telah membentuk sebuah direktorat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dirbidik), untuk menguatkan peran orangtua sebagai

pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Sejumlah program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Penanganan perundungan atau *bullying*,
- 2) Pendidikan penanganan remaja,
- 3) Penguatan prestasi belajar,
- 4) Pendidikan karakter dan kepribadian,
- 5) Pendidikan kecakapan hidup, serta
- 6) Pendidikan pencegahan perilaku destruktif.
- 7) pencegahan perdagangan orang, narkoba, dan HIV/ AIDS agar keluarga Indonesia menjadi lebih kuat," Program tersebut, kata Ella, ingin mencapai peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi seluruh keluarga di Indonesia.
- 8) Memberikan bekal pengetahuan sehingga penduduk usia dewasa memperoleh wawasan, dan pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa. Kemendikbud menargetkan hingga 2019, jumlah penduduk dewasa yang mendapatkan layanan pendidikan keluarga mencapai 4.343.500 orang.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Struktur ini telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat tersebut memiliki empat subdirektorat, yakni Program dan Evaluasi, Pendidikan Bagi Orangtua, Pendidikan Anak dan Remaja, serta Subdirektorat Kemitraan.

g) Masalah Sosial

Masalah Sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini berdasarkan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Contoh masalah sosial adalah kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan, tindak kejahatan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang menimbulkan masalah sosial antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Masalah dalam ekonomi biasanya berupa masalah pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Dalam masalah ini biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah kurang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini akan mengakibatkan sangat rentannya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas dan kekurangan ekonomi dapat dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan maju atau tidaknya suatu negara serta faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat.

2. Faktor Budaya

Faktor ini maksudnya adalah bahwa kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya seperti pernikahan pada usia dini, kawin-ceraai, kenakalan pada remaja dan lain-lain atau seperti saat ini negara kita sedang terus menerus dimasuki budaya asing.

Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Dengan mempelajari atau mendalami pendidikan agama mungkin dapat mencegah, menyadarkan ataupun menyaring budaya asing yang masuk.

3. Faktor Biologis

Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial misalnya seperti kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit, untuk solusinya mungkin pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan tentang

pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga dapat juga muncul jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat khususnya di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stress lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat.

Contoh-contoh masalah sosial antara lain:

1. Kemiskinan
2. Pengangguran
3. Masalah pendidikan

Yaitu kurangnya pendidikan merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, misalnya seperti banyak anak-anak membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam membiayai sekolah.

4. Tindak Kejahatan

Sebenarnya, kemiskinan dan pengangguran merupakan dua dari banyak factor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan agar mereka dapat bertahan hidup. Tindak kejahatan yang dilakukan dapat berdampak besar, sehingga timbullah masalah sosial.

5. Kepadatan Penduduk

Negara Indonesia contohnya saat ini memiliki angka kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Padatnya jumlah penduduk dapat memicu timbulnya peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan, sehingga akhirnya timbul masalah sosial

6. Lingkungan Hidup

Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan keinginan semua orang. Namun akhir-akhir ini, perilaku manusia yang tidak mempedulikan kesehatan lingkungan menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan

yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang akan berdampak pada banyak orang.

h) Penyakit Sosial

Penyakit sosial adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang.

Contoh Penyakit Sosial:

1. Lingkungan Sekolah

Contoh dari kenakalan remaja yaitu :

- **Berpacaran** : Saat ini banyak dari pelajar Indonesia yang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hal ini sebenarnya termasuk ke dalam penyimpangan dari norma agama dan sosial, dimana pelajar yang harusnya belajar malah menjalin asmara dengan lawan jenis.
- **Tawuran Pelajar** : Tawuran pelajar berbeda dengan perkelahian satu-satu. Tawuran dilakukan oleh kelompok pelajar yang biasanya dilakukan dengan pelajar dari sekolah lain. Tawuran pelajar sangat berlawanan dengan norma agama dan sosial, dimana rasa persaudaraan antar pelajar telah hilang di antara mereka. Anehnya, tawuran pelajar dapat dipicu dari hal-hal sepele dan tidak penting yang kemudian dibesar-besarkan hingga timbul konflik berkepanjangan. Tawuran merupakan perilaku menyimpang karena bersifat merusak, menyakiti orang lain, menganiaya, cacat permanen bahkan membunuh. Sungguh menjadi ironi bangsa ini, bukannya menjadi pelajar yang berkualitas membangun negerinya, malah menjadi momok dan sampah masyarakat.
- **Pornografi** : Perilaku menyimpang ini masih kerap dilakukan pelajar yang memiliki nilai moral yang buruk. Kecenderungan menonton video porno di internet akan mengakibatkan hal yang lebih ekstrim. Misalnya melakukan seks di kala masih pelajar, lalu menguploadnya ke internet.
- **Pemerasan** : Perilaku ini biasanya dilakukan oleh pelajar yang memiliki postur tubuh lebih besar atau kakak kelas terhadap adik kelasnya. Perilaku ini masih sering dilakukan, bahkan menjadi momok yang sangat susah

dihilangkan dari lingkungan sekolah. Seakan-akan menjadi budaya yang masih dilestarikan oleh pelajar di Indonesia.

- **Bullying** : Kegiatan ini masih sering dilakukan pelajar Indonesia. Mengejek, menghina, merendahkan, dan jahil terhadap seseorang baik secara fisik maupun non-fisik.

Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kategorikan sebagai kenakalan remaja, seperti bolos sekolah, menyontek, corat-coret dinding, konvoi lulusan, kebut-kebutan, dan lain-lain

2. Lingkungan Keluarga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut juga KDRT merupakan penyakit sosial yang masih sering kita jumpai di masyarakat. Di televisi banyak diberitakan seorang suami tega menganiaya istrinya, bahkan hingga berakhir pada pembunuhan. Banyak faktor yang menyebabkan KDRT, misalnya karena selingkuh, ekonomi buruk, poligami, sikap egois yang tinggi atau kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Lingkungan Masyarakat

Penyakit sosial di lingkungan masyarakat antara lain:

a. Perjudian,

b. Pergunjingan

Dalam norma agama kita telah diatur untuk tidak melakukan perbuatan ini, karena bagaimanapun, orang yang mengunjing dikiaskan sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri,

c. Minum minuman keras (miras),

d. Kriminalitas,

e. Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Menurut hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Graham Baliane, seorang psikiater menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang remaja menggunakan narkotika, yaitu :

- Membuktikan keberaniannya dalam melakukan hal-hal yang berbahaya;

- Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru dan norma sosial;
- Mempermudah penyimpangan perilaku seks;
- Melepaskan diri dari kesepian;
- Mencari dan menemukan jati diri;
- Mengisi kekosongan;
- Menghilangkan frustrasi dan kegelisahan hidup;
- Mengikuti teman karena tidak ingin dikatakan sebagai pecundang;
- Sekedar iseng dan dorongan rasa ingin tahu.

f. Perilaku Seks di Luar Nikah (perzinahan)

Seiring dengan perkembangan zaman (akibat pengaruh globalisasi), masyarakat sudah berbaur dengan pornografi. Bergesernya nilai dan norma masyarakat tersebut memicu perilaku seks di luar nikah, yang berdampak pada bentuk penyimpangan lainnya. Misalnya hamil di luar nikah, praktik aborsi, pembunuhan terhadap bayi, perdagangan bayi dan anak. Perilaku seks di luar nikah akan sangat merugikan, terutama bagi perempuan karena tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang syah, misalnya hak-hak istri dan hak anak yang dilahirkannya.

g. Homoseksual

Homoseksual adalah bentuk perilaku yang menjijikan, dimana seseorang lebih tertarik kepada sesama jenis. Seorang pria tertarik dengan pria lain dan menjalin hubungan layaknya dengan lawan jenis (disebut gay). Begitu pula dengan wanita yang hidup bersama dengan wanita lainnya dan menjadikannya sebagai pasangan seksualnya (disebut lesbi). Perilaku ini sangat bertentangan dengan tatanan sosial, terutama dalam norma agama dan norma sosial.

h. Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK)

Prostitusi sampai saat ini masih menjadi penyakit sosial yang sangat sulit dihilangkan, bahkan menjadi penyakit yang tertua dimana dari generasi ke generasi masih terus bermunculan. Salah satu pemicu utama adanya

prostitusi yaitu kemiskinan. Praktik haram ini umumnya berdekatan dengan tempat wisata atau hiburan. Kegiatan ini bisa dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dengan berkedok ekonomi yang telah membaur dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang nilai moral dan agamanya kurang, didukung oleh keadaan ekonomi yang buruk, akan sangat mudah terjerumus pada hal-hal seperti ini. Mereka menginginkan uang yang banyak tetapi tanpa bekerja keras misalnya mencari rezeki dengan menjual harga dirinya.

Prostitusi ini juga dapat menimbulkan penyakit seperti HIV/AIDS, sivilis, raja singa dan penyakit berbahaya lainnya. Meski pemerintah telah berupaya melakukan razia di berbagai tempat, namun kenyataannya masih ada saja orang-orang yang melakukan kegiatan ini dan hal tersebut sangat memprihatinkan kita semua.

BAB III

PROFIL KOTA BLITAR

3.1. Kondisi Umum Kota Blitar

Kota Blitar yang disebut sebagai kota Bumi Bung Karno juga dikenal dengan sebutan Kota Patria dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Meskipun status pemerintahannya kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti kota-kota besar, termasuk luas wilayahnya tidak mencerminkan sebuah kota yang luas. Level yang dicapai kota Blitar digolongkan sebagai kota sedang.

Kota Blitar merupakan tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, ideolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sodanco Supriyadi.

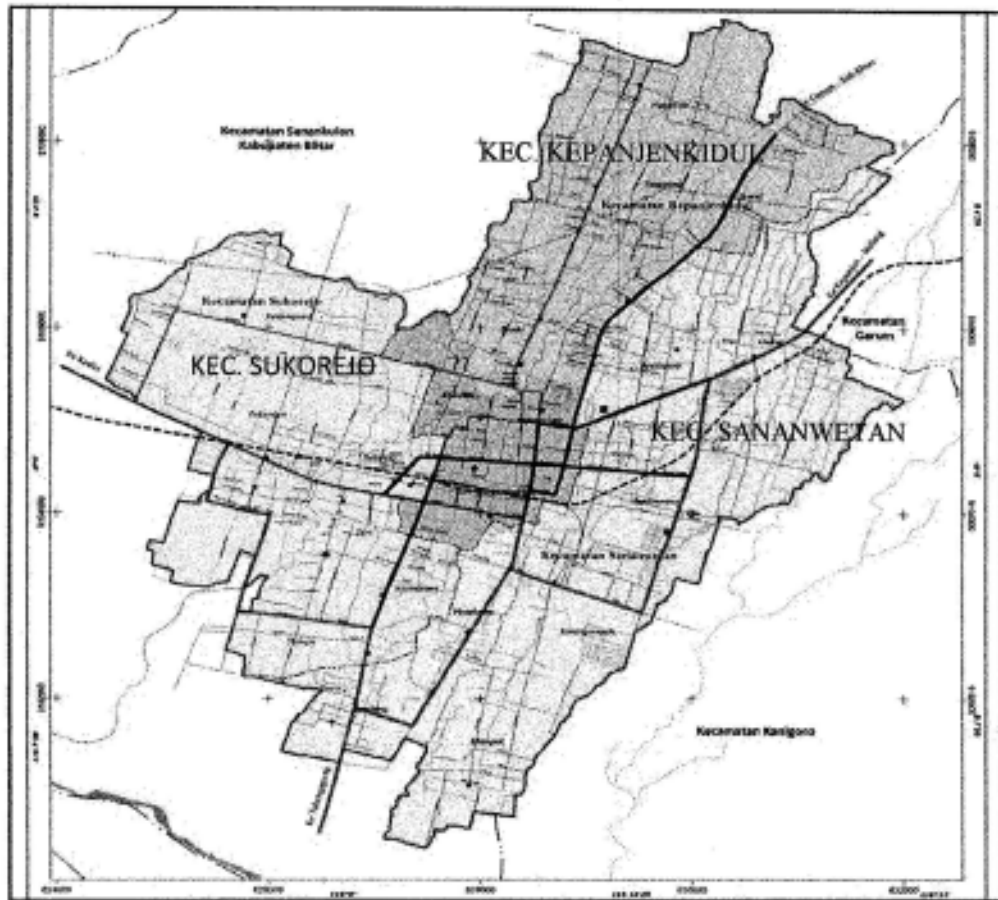
Kota Blitar merupakan wilayah kota terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, semua wilayah dikelilingi Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok
- Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok.

Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,58 km² dan terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km², Kecamatan Sukorejo

dengan luas 9,93 km², dan Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Masing-masing kecamatan memiliki 7 (tujuh) kelurahan yang kemudian terbagi dalam 187 Rukun Warga (RW) dan 638 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 3.1
Peta Administratif Kota Blitar



Sumber : RTRW Kota Blitar 2011-2030

Berdasarkan data registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

3.2. Kependudukan

Jumlah penduduk, kepemilikan akta kelahiran di Kota Blitar sampai dengan per kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Blitar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	3,956	4,207	8,163
2		NGADIREJO	1,851	1,805	3,656
3		SENTUL	4,019	4,077	8,096
4		KAUMAN	3,316	3,370	6,686
5		TANGGUNG	2,948	2,906	5,854
6		BENDO	3,006	3,037	6,043
7		KEPANJENLOR	2,930	3,004	5,934
		JUMLAH	22,026	22,406	44,432
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	5,625	5,556	11,181
9		BLITAR	2,338	2,430	4,768
10		TLUMPU	1,954	1,980	3,934
11		TURI	1,621	1,673	3,294
12		KARANGSARI	2,775	2,728	5,503
13		SUKOREJO	7,481	7,351	14,832
14		TANJUNGSARI	4,667	4,594	9,261
		JUMLAH	26,461	26,312	52,773
15	SANANWETAN	GEDOG	5,698	5,673	11,371
16		PLOSOKEREP	2,536	2,597	5,133
17		KLAMPOK	2,439	2,425	4,864
18		SANANWETAN	7,036	7,179	14,215
19		REMBANG	1,551	1,671	3,222
20		KARANGTENGAH	3,856	3,839	7,695
21		BENDOGERIT	5,448	5,561	11,009
		JUMLAH	28,564	28,945	57,509
		KOTA BLITAR	77,051	77,663	154,714

Sumber : DKB 201702, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.2
Kepemilikan Akta Kelahiran Wajib Akta (Usia 0 s/d18 Tahun) Kota Blitar Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH WAJIB AKTA (USIA 0 SD 18 TAHUN) YANG SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			JUMLAH WAJIB AKTA (USIA 0 SD 18 TAHUN)	% JUMLAH WAJIB AKTA (USIA 0 SD 18 TAHUN) MEMILIKI AKTA
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	1,003	926	1,929	2,230	86.50
2		NGADIREJO	502	436	938	1,075	87.26
3		SENTUL	1,068	1,009	2,077	2,335	88.95
4		KAUMAN	927	868	1,795	2,058	87.22
5		TANGGUNG	797	775	1,572	1,785	88.07
6		BENDO	824	810	1,634	1,769	92.37
7		KEPANJENLOR	775	698	1,473	1,664	88.52
		JUMLAH	5,896	5,522	11,418	12,916	88.40
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	1,598	1,507	3,105	3,375	92.00
9	SUKOREJO	BLITAR	611	581	1,192	1,337	89.15
10	SUKOREJO	TLUMPU	523	496	1,019	1,146	88.92
11	SUKOREJO	TURI	418	407	825	946	87.21
12	SUKOREJO	KARANGSARI	713	676	1,389	1,541	90.14
13	SUKOREJO	SUKOREJO	1,955	1,829	3,784	4,297	88.06
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	1,327	1,241	2,568	2,846	90.23
		JUMLAH	7,145	6,737	13,882	15,488	89.63
15	SANANWETAN	GEDOG	1,618	1,460	3,078	3,347	91.96
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	739	722	1,461	1,612	90.63
17	SANANWETAN	KLAMPOK	679	647	1,326	1,429	92.79
18	SANANWETAN	SANANWETAN	1,931	1,768	3,699	4,120	89.78
19	SANANWETAN	REMBANG	400	385	785	926	84.77
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	1,145	1,059	2,204	2,440	90.33
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	1,443	1,373	2,816	3,088	91.19
		JUMLAH	7,955	7,414	15,369	16,962	90.61
		KOTA BLITAR	20,996	19,673	40,669	45,366	89.65

Sumber : DKB 201702, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3
Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Usia 0 s/d 19 Tahun Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	0-19 Thn		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	1,206	1,137	2,343
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	599	529	1,128
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	1,264	1,180	2,444
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	1,120	1,034	2,154
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	959	912	1,871

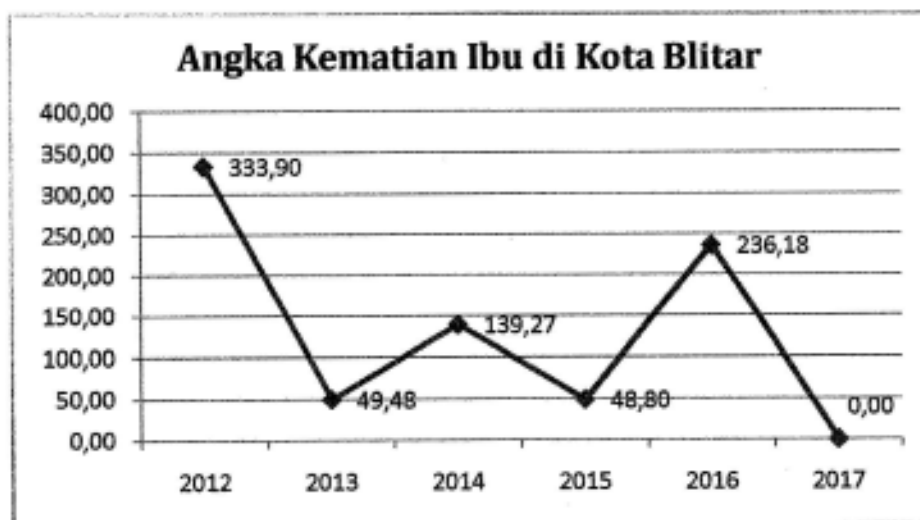
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	0-19 Thn		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	947	927	1,874
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	923	823	1,746
		JUMLAH	7,018	6,542	13,560
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	1,805	1,733	3,538
9	SUKOREJO	BLITAR	716	702	1,418
10	SUKOREJO	TLUMPU	613	585	1,198
11	SUKOREJO	TURI	503	489	992
12	SUKOREJO	KARANGSARI	836	790	1,626
13	SUKOREJO	SUKOREJO	2,356	2,159	4,515
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	1,545	1,438	2,983
		JUMLAH	8,374	7,896	16,270
15	SANANWETAN	GEDOG	1,861	1,658	3,519
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	850	819	1,669
17	SANANWETAN	KLAMPOK	773	727	1,500
18	SANANWETAN	SANANWETAN	2,261	2,066	4,327
19	SANANWETAN	REMBANG	490	478	968
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	1,330	1,222	2,552
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	1,686	1,571	3,257
		JUMLAH	9,251	8,541	17,792
		KOTA BLITAR	24,643	22,979	47,622

Sumber : DKB 201702, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

3.3. Data-data terkait dengan Ketahanan Keluarga

a. Angka Kematian Ibu

Gambar 3.2.
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kota Blitar 2012-2017

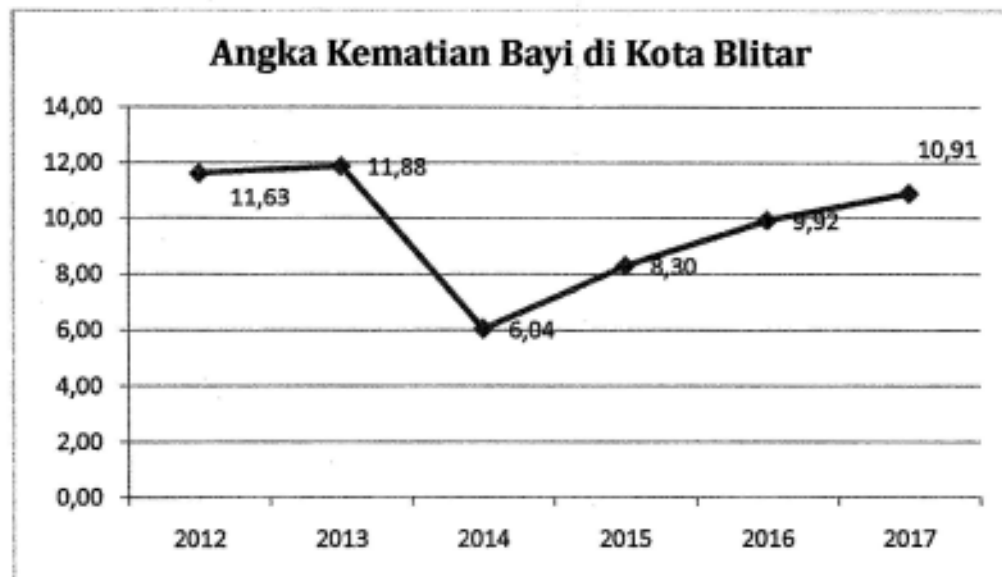


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

b. Angka Kematian Bayi

Angka kematian Bayi di Kota Blitar masih menjadi hal perhatian khusus, karena selama 4 (empat) tahun terakhir angka mengalami kenaikan, meskipun dari segi jumlah lebih sedikit dari daerah lain.

Gambar 3.3.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Blitar
Tahun 2012-2017

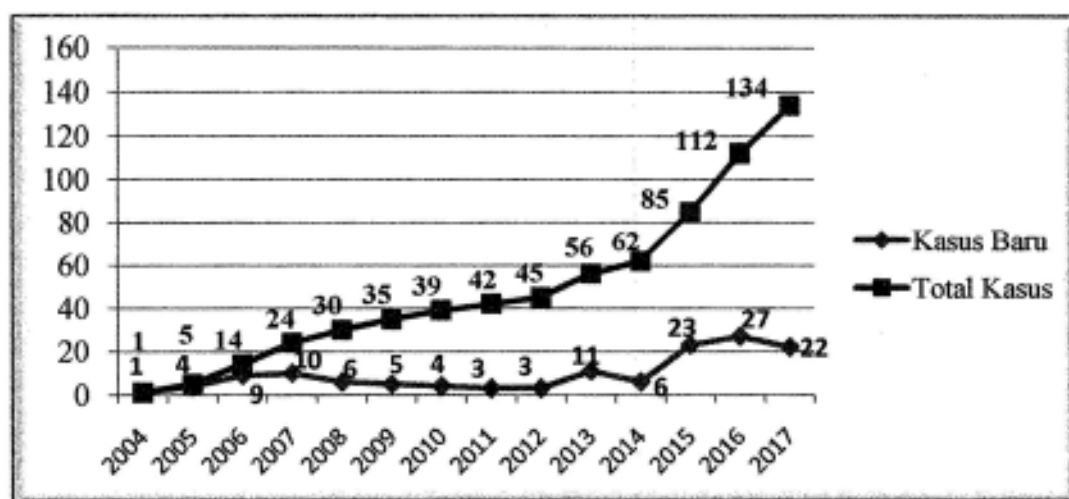


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

c. Data Terinfeksi HIV/AIDS

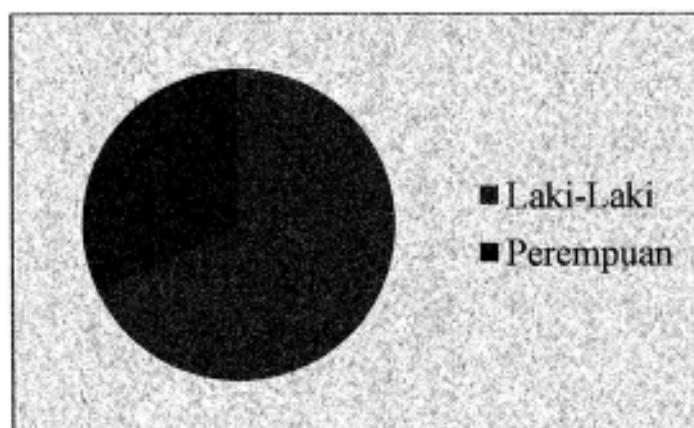
Situasi epidemi HIV/AIDS di kab/kota Jawa Timur telah mengkhawatirkan, sehingga apabila tidak ditangani secara serius, maka tidak mustahil Jawa Timur kedepan akan dapat menjadi kabupaten/kota generalized dari situasi yang terkonsentrasi seperti saat ini. Jumlah temuan kasus di Kota Blitar semakin bertambah setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.4.
Kasus HIV AIDS di Kota Blitar s/d 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar,2018

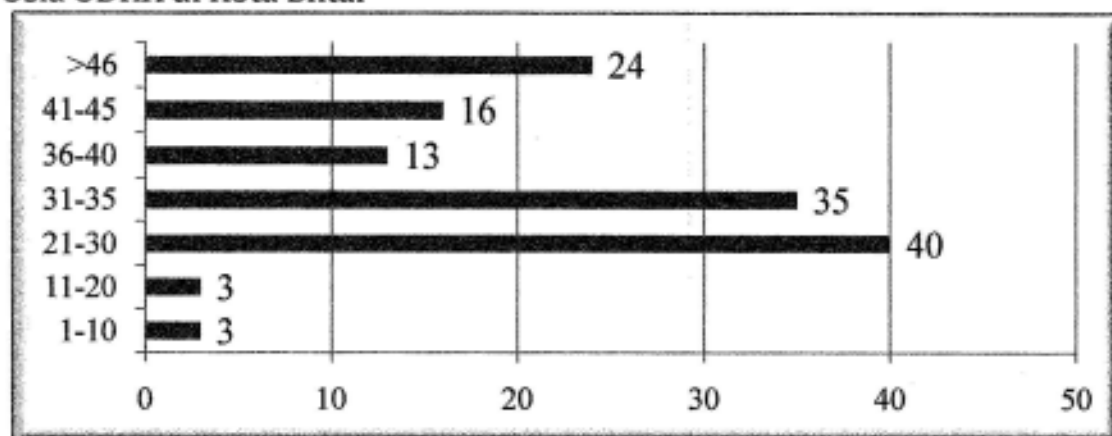
Gambar 3.5.
Jenis Kelamin ODHA di Kota Blitar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar,2018

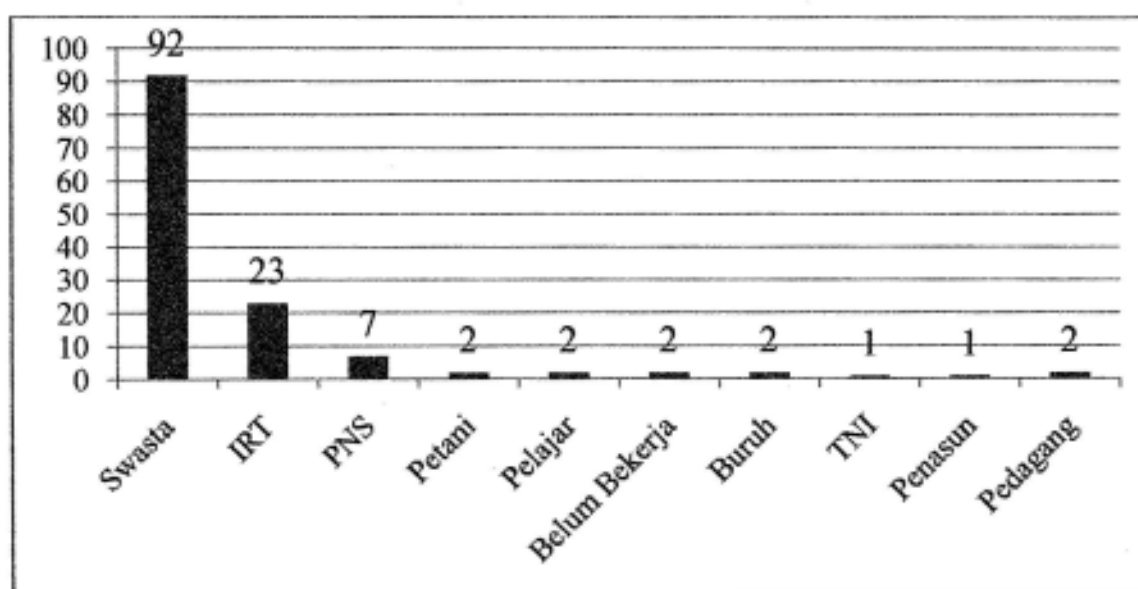
Gambar 3.6.
Kasus HIV AIDS di Kota Blitar Berdasarkan Usia

Usia ODHA di Kota Blitar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

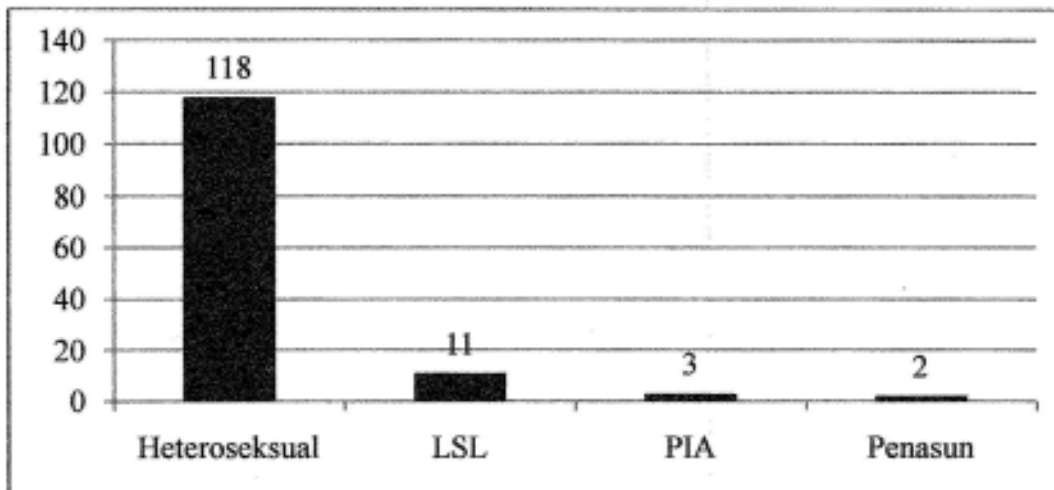
Gambar 3.7.
Kasus HIV AIDS di Kota Blitar berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

Gambar 3.8.

Penyebab Penularan ODHA di Kota Blitar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

Keterangan:

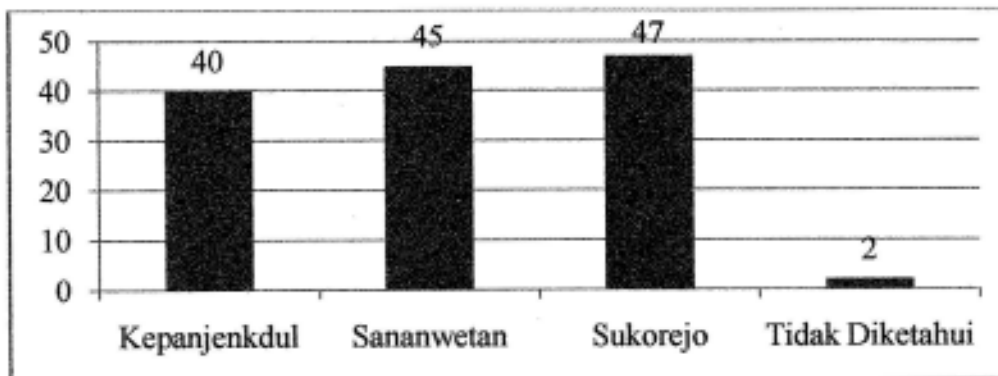
Penasun : Pengguna Napza Suntik

LSL : Lelaki Seks dengan Lelaki

PIA : Penularan dari Ibu ke Anak

Gambar 3.9.

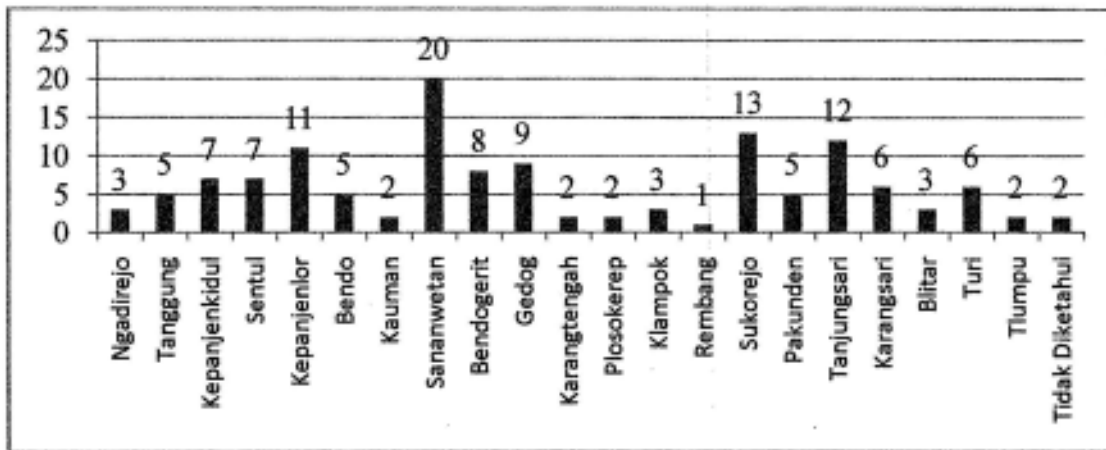
Jumlah Kasus HIV/AIDS Per Kecamatan di Kota Blitar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

Gambar 3.10.

Jumlah Kasus HIV/AIDS Per Kelurahan di Kota Blitar



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

Tabel 3.4.

Data Kesehatan Reproduksi Kota Blitar Tahun 2015 s.d Maret 2016

		2015	2016
1	Remaja Hamil	30	5
2	IMS	15	5
3	ISR	7	-
4	Seks Pra Nikah	2	2
5	NAPZA	1	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2018

d. Data KDRT dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Blitar memang angkanya mengalami kenaikan, tetapi hal ini justru dilihat bahwa kesempatan untuk melaporkan kasus kekerasan semakin terbuka. Data terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Blitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

6

Tabel 3.5.**Data KDRT dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017**

NO	JENIS DATA	KOTA BLITAR			LUAR KOTA BLITAR		
		Perempuan	Anak	Jumlah	Perempuan	Anak	Jumlah
1	ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	0	5	5	0	1	1
2	KDRT	9	4	13	7	1	8
3	KEKERASAN SEKSUAL	1	4	5	0	1	1
4	KONSELING	2	8	10	1	0	1
5	PERLINDUNGAN	4	5	9	0	6	6
6	PERKELAHIAN PELAJAR	0	1	1	0	0	0
7	JUMLAH	16	27	43	8	9	17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2017

e. Data Pekerja Anak

Sesuai dengan laporan dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa tidak dijumpai anak yang dipekerjakan.

f. Data Perceraian

Angka perceraian hidup di Kota Blitar menunjukkan angka yang tidak sedikit yaitu 3.695 pada Tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.**Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kota Blitar**

Kecamatan	Memiliki akta perceraian		Belum Memiliki akta perceraian		Jumlah Wajib Memiliki akta perceraian
	Σ	%	Σ	%	
Kepanjenkidul	610	55,61	487	44,39	1.097
Sukorejo	769	59,84	516	40,16	1.285
Sananwetan	781	59,48	532	40,52	1.313
Jumlah	2.160	58,46	1.535	41,54	3.695

Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Semester 1 Tahun 2017 diolah, 2017

Tabel 3.7.
Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Blitar

Kecamatan	Belum kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kepanjenkidul	19.476	12,70	20.825	13,58	1.097	0,72	2.648	1,73	44.048	28,72
Sukorejo	23.194	15,12	24.570	16,02	1.285	0,84	3.236	2,11	52.285	34,09
Sananwetan	25.266	16,47	27.154	17,70	1.313	0,86	3.329	2,17	57.062	37,20
Jumlah	67.938	44,29	72.549	47,30	3.695	2,41	9.213	6,01	153.395	100,00

Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Semester 1 Tahun 2017 diolah, 2017

g. Data Kasus Kriminalitas

Tabel 3.8.
Perkara Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012- 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A. Kejahatan Yang Dilaporkan	299	511	412	366	440
1. Pembunuhan	2	1	3	2	1
2. Perampokan	0	12	4	7	0
3. Pencurian Biasa	35	56	36	31	49
4. Pencurian Berat	50	82	39	57	53
5. Lain-lain	212	360	330	269	337
B. Kejahatan Yang Diselesaikan	141	257	246	202	250
1. Pembunuhan	1	1	2	2	1
2. Perampokan	0	5	1	5	0
3. Pencurian Biasa	21	40	22	20	33
4. Pencurian Berat	16	19	23	23	20
5. Lain-lain	103	192	198	152	196

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Tabel 3.9.
Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012 - 2016

Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1. Pencurian Berat	82	27	39	23	28	14	57	23	53	20
2. Pencurian Biasa	56	45	36	22	9	8	31	20	49	33
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	77	21	51	7	18	2	42	5	40	15
4. Perkosaan	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
5. Penipuan	50	17	63	19	33	9	81	13	72	16
6. Penggelapan	24	12	19	8	7	5	15	8	16	7

Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
7. Penganiayaan	14	13	7	6	3	3	15	11	15	15
8. Sajam	4	4	2	1	0	0	2	2	2	1
9. Kebakaran	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
10. Perjudian	68	68	61	61	28	28	38	38	41	41
11. Pengerusakan	3	3	6	4	2	0	9	1	1	1
12. Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
13. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	75	80	151	101
Jumlah/ Total	380	212	286	152	130	71	366	202	440	250

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

h. Angka Kelulusan Sekolah dan Angka Putus Sekolah

Tabel 3.10
Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah di Kota Blitar

No	Tahun ajaran	Angka Kelulusan			Angka Putus Sekolah		
		SD	SMP	DIKDASMEN	SD	SMP	DIKDASMEN
1	2017-2018	99,41	96,99	98,20	0,01	0,00	0,01
2	2016-2017	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	2015-2016	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,02

Sumber: Profil Pendidikan Kota Blitar 2017

i. Kasus Narkoba

Tabel 3.11
Kejahatan Narkoba yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Narkoba di Kota Blitar Tahun 2016

NO	JENIS NARKOBA	DILAPORKAN DAN DISELESAIKAN	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Sabu-sabu	14	3
2.	Ganja	-	-
3.	Obat Keras (Pill LL)	6	-
	Jumlah	20	3

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2017

Tabel 3.12
Kejahatan Narkoba yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut
Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2016

NO	JENIS NARKOBA	DILAPORKAN DAN DISELESAIKAN	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Sukorejo	8	1
2.	Sananwetan	3	1
3.	Sananwetan	9	1
	Jumlah	20	3

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2017

j. Data Anak Terlantar

Data anak terlantar dapat dilihat dalam data PMKS di Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 3.13
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kota Blitar Tahun 2017

NO	JENIS PMKS	SN WETAN	SUKOREJO	KEP KDIL	JML
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	2	1	0	3
2.	Anak Terlantar (AT)	6	4	6	16
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	9	2	5	16
4.	Anak Jalanan	7	9	1	17
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	44	9	39	92
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	0	0	0	-
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	3	0	9
8.	Lanjut Usia Terlantar	36	24	36	96
9.	Penyandang Disabilitas	204	117	172	493
10.	Tuna Susila	1	1	0	2
11.	Gelandangan	2	1	3	6
12.	Pengemis	2	7	1	10
13.	Pemulung	27	33	10	70
14.	Kelompok Minoritas	0	0	7	7
15.	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	41	35	36	112
16.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-	80
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	10	5	1	16
18.	Korban Trafficking	0	0	0	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	-
21.	Korban Bencana Alam	0	0	0	-

NO	JENIS PMKS	SN WETAN	SUKOREJO	KEP KDIL	JML
22.	Korban Bencana Sosial	0	0	0	-
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5	9	6	20
24.	Fakir Miskin (Kemiskinan BPS)				11,220
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	205
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0	-
	JUMLAH				12,490

Sumber: Dinas Sosial Kota Blitar, 2017

k. Data Kepala Keluarga

Tabel 3.14.
Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	1,998	682	2,680
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	884	242	1,126
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	2,002	478	2,480
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	1,575	434	2,009
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	1,537	299	1,836
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	1,533	353	1,886
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	1,397	498	1,895
		JUMLAH	10,926	2,986	13,912
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	2,772	680	3,452
9	SUKOREJO	BLITAR	1,199	307	1,506
10	SUKOREJO	TLUMPU	1,001	251	1,252
11	SUKOREJO	TURI	804	254	1,058
12	SUKOREJO	KARANGSARI	1,389	371	1,760
13	SUKOREJO	SUKOREJO	3,640	1,144	4,784
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	2,305	489	2,794
		JUMLAH	13,110	3,496	16,606
15	SANANWETAN	GEDOG	2,850	636	3,486
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	1,274	338	1,612
17	SANANWETAN	KLAMPOK	1,255	297	1,552
18	SANANWETAN	SANANWETAN	3,472	971	4,443
19	SANANWETAN	REMBANG	814	240	1,054
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	1,912	426	2,338
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	2,686	721	3,407
		JUMLAH	14,263	3,629	17,892
		KOTA BLITAR	38,299	10,111	48,410

Sumber : DKB 201702, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

I. Data Rata-rata Usia Kawin Pertama

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Rata-rata usia kawin pertama hanya dihitung dari penduduk perempuan saja, karena angka ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi fertilitas. Semakin rendah umur kawin pertama semakin besar peluang seorang perempuan untuk melahirkan.

Rata-rata umur kawin pertama dilakukan dengan metode *Singulate Mean Age at marriage* (SMAM) yang dihitung berdasarkan proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Blitar Semester I Tahun 2017* pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin) dalam suatu periode tertentu.

Tabel 3.15.
Rata-rata Usia Kawin Pertama Kota Blitar

Kelompok Umur	Σ Pddk Belum Kawin	Σ Pddk	% Lajang
15 – 19	12.152	12.237	99,31
20 – 24	9.547	11.352	84,10
25 – 29	4.744	10.915	43,46
30 – 34	2.562	13.025	19,67
35 – 39	1.679	13.614	12,33
40 – 44	1.029	11.512	8,94
45 – 49	736	11.503	6,40
50 – 54	442	9.633	4,59
SMAN (tahun)			27,47

Sumber : DKB 201702, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian

Dalam Negeri

m. Data Pendapatan Masyarakat Kota Blitar

Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. Indeks gini digunakan untuk mengukur pemerataan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Blitar. Pembangunan Daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi saja, namun disertai dengan peningkatan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan gambar berikut, Indeks gini Kota Blitar berkisar pada nilai 0,36 berarti termasuk ketimpangan sedang (0,3-0,5). Dengan demikian pemerataan pendapatan di Kota Blitar relatif tinggi dan pada Tahun 2015 hampir sama dengan nilai Indeks gini Provinsi Jawa Timur 0,4 yang dimungkinkan Tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

Gambar 3.11.
Perkembangan Indeks Gini Kota Blitar 2012-2017



Sumber : BPS Kota Blitar, 2018

Keterangan :
 IG < 0,3: ketimpangan rendah
 0,3 < IG < 0,5 : ketimpangan sedang
 IG > 0,5 : ketimpangan tinggi

n. Data Mata pencaharian Masyarakat Kota Blitar

Dari data mata pencaharian penduduk di Kota Blitar, dapat diketahui 10 (sepuluh) urutan dari yang persentase tertinggi adalah:

1. Belum/ Tidak Bekerja (23,79%)
2. Pelajar/Mahasiswa (17,21%)
3. Mengurus Rumah Tangga (16,09%)
4. Karyawan Swasta (10,26%)
5. Wiraswasta (9,92%)
6. Buruh Harian Lepas (4,56%)

7. PNS (3,06%)
8. Perdagangan (2,36%)
9. Pedagang (2,26%)
10. Pensiunan (1,88%)

Tabel. Data Angkatan Kerja Kota Blitar 2017-2018

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Jumlah		
			2017	2018	Selisih
1.	Penduduk usia kerja (15 tahun +)	jiwa	108.033	109.160	1.127
2.	Angkatan kerja	jiwa	77.674	78.820	1.146
	Bekerja	jiwa	74.752	75.618	866
	Pengangguran	jiwa	2.922	3.202	280
3.	Bukan Angkatan Kerja	jiwa	30.359	30.340	-19
	Sekolah	jiwa	8.566	7.596	-997
	Mengurus Rumah Tangga	jiwa	18.028	17.076	-952
	Lainnya	jiwa	3.765	5.668	1.903
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	71,90	72,21	0,31
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	3,76	4,06	0,3

Sumber: DPM Naker PTSP Kota Blitar, 2018

Tabel 3.16. Data Mata Pencaharian Penduduk di Kota Blitar Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	BELUM TIDAK BEKERJA	PELAJAR MAHASISWA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KARYAWAN SWASTA	WIRASWASTA	BURUH_HARI AN_LEPAS	PEGAWAI NEGERI_SIPIL	PERDAGANGAN	PEDAGANG	PENSUNAN	PETANI_PETANI KEBUN
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	1,902	1,416	1,270	1,022	914	297	217	185	219	203	3
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	834	631	582	256	489	124	81	76	67	40	150
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	1,933	1,339	1,334	696	861	484	215	201	193	98	90
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	1,700	1,160	1,028	780	850	206	152	168	158	69	18
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	1,384	957	950	362	652	337	148	137	119	51	167
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	1,390	1,105	1,000	672	480	381	191	95	113	96	42
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	1,346	1,061	885	683	910	144	163	67	110	201	7
		JUMLAH	10,489	7,669	7,049	4,471	5,156	1,973	1,167	929	979	758	477
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	2,881	1,706	1,781	930	1,050	644	233	483	591	119	95
9	SUKOREJO	BLITAR	1,066	832	784	452	684	151	155	98	78	70	67
10	SUKOREJO	TLUMPU	842	719	672	397	252	351	113	101	72	53	44
11	SUKOREJO	TURI	808	510	577	379	298	178	69	119	65	38	10
12	SUKOREJO	KARANGSARI	1,315	883	891	686	505	308	127	87	145	110	61
13	SUKOREJO	SUKOREJO	3,718	2,382	2,580	1,364	1,768	900	147	566	563	92	39
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	2,148	1,725	1,393	822	710	389	377	239	236	119	243
		JUMLAH	12,778	8,757	8,678	5,030	5,267	2,921	1,221	1,693	1,750	601	559
15	SANANWETAN	GEDOG	2,583	2,122	1,911	1,268	835	526	473	201	117	236	143
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	1,222	930	736	455	663	200	184	114	87	78	51
17	SANANWETAN	KLAMPOK	1,154	765	932	501	331	298	79	151	64	45	136
18	SANANWETAN	SANANWETAN	3,353	2,563	2,068	1,711	1,184	433	725	175	220	551	67
19	SANANWETAN	REMBANG	768	525	506	345	290	142	91	122	56	68	47
20	SANANWETAN	KARANGTENGGAH	2,145	1,205	1,292	774	484	253	258	90	92	160	41
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	2,322	2,096	1,724	1,321	1,141	313	538	178	124	411	64
		JUMLAH	13,547	10,206	9,169	6,375	4,928	2,165	2,348	1,031	760	1,549	549
		KOTA BLITAR	36,814	26,632	24,896	15,876	15,351	7,059	4,736	3,653	3,489	2,908	1,585
		Persentase terhadap jumlah penduduk	23.79	17.21	16.09	10.26	9.92	4.56	3.06	2.36	2.26	1.88	1.02
		Urutan/Ranking	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	GURU	BURUH_TANI _PERKEBUN AN	KARYAWAN_HO NORER	TUKANG_ BATU	SOPIR	PEMBANTU_ RUMAH_TAN GGA	KARYAWAN _BUMN	TENTARA_NA SIONAL_INDO NESIA	KEPOLISIAN _RI	TUKAN G_JAHIT	TRANSP ORTASI
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	63	2	44	20	37	50	47	6	21	23	13
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	34	86	14	21	6	33	5	12	14	9	1
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	104	118	67	45	30	49	23	17	32	19	18
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	77	10	26	25	13	28	28	5	14	24	19
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	58	110	25	24	14	12	5	18	12	23	10
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	63	76	31	35	38	31	15	7	18	32	12
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	61	8	27	8	16	34	48	15	11	18	6
		JUMLAH	460	410	234	178	154	237	171	80	122	148	79
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	87	70	35	55	69	32	27	16	25	37	32
9	SUKOREJO	BLITAR	46	26	25	14	30	17	23	14	26	6	19
10	SUKOREJO	TLUMPU	20	39	15	41	25	27	14	5	13	11	14
11	SUKOREJO	TURI	19	9	26	17	33	26	12	8	4	12	23
12	SUKOREJO	KARANGSARI	56	47	30	21	56	10	12	9	14	25	15
13	SUKOREJO	SUKOREJO	75	28	49	48	97	54	17	16	16	39	54
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	132	193	59	69	35	24	41	17	35	25	14
		JUMLAH	435	412	239	265	345	190	146	85	133	155	171
15	SANANWETAN	GEDOG	126	147	53	93	50	62	59	41	68	23	17
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	50	49	40	28	31	21	15	14	17	20	31
17	SANANWETAN	KLAMPOK	33	81	18	47	20	19	10	18	10	10	28
18	SANANWETAN	SANANWETAN	193	51	100	66	68	72	96	32	76	37	32
19	SANANWETAN	REMBANG	45	16	15	16	24	15	16	4	9	8	22
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	103	97	42	35	38	28	44	309	41	18	7
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	128	35	75	62	39	54	82	17	28	15	29
		JUMLAH	678	476	343	347	270	271	322	435	249	131	166
		KOTA BLITAR	1,573	1,298	816	790	769	698	639	600	504	434	416
		Persentase terhadap jumlah penduduk	1.02	0.84	0.53	0.51	0.50	0.45	0.41	0.39	0.33	0.28	0.27
		Urutan/Ranking	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	MEKANIK	TUKANG_KA YU	INDUST RI	PERAWAT	PETERNA K	TUKANG_LAS_ PANDAI_BESI	DOSEN	KONSTRUK SI	DOKTER	KARYAWAN _BUMD	BIDAN
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	19	11	1	12	11	13	12	6	27	5	4
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	7	11	18	1	8	0	1	2	0	3	5
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	21	14	2	10	6	7	6	2	5	3	3
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	15	25	3	6	4	10	9	1	8	5	2
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	30	53	63	8	11	7	5	3	5	2	3
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	20	15	1	9	7	12	7	1	3	6	6
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	12	4	0	5	7	6	7	7	9	4	3
		JUMLAH	124	133	88	51	54	55	47	22	57	28	26
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	20	20	16	15	9	12	12	7	11	4	6
9	SUKOREJO	BLITAR	5	6	14	11	0	6	0	8	1	1	4
10	SUKOREJO	TLUMPU	14	2	26	4	11	3	2	6	1	3	2
11	SUKOREJO	TURI	13	4	4	1	3	3	2	3	1	0	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	19	8	4	4	7	12	0	4	8	1	2
13	SUKOREJO	SUKOREJO	47	17	7	7	15	14	8	10	3	3	5
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	36	19	15	11	24	15	5	8	5	5	9
		JUMLAH	154	76	86	53	69	65	29	46	30	17	28
15	SANANWETAN	GEDOG	34	26	11	14	6	16	7	21	7	15	4
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	11	9	2	8	9	8	7	8	7	5	4
17	SANANWETAN	KLAMPOK	10	19	11	6	9	1	4	28	3	0	2
18	SANANWETAN	SANANWETAN	39	27	1	35	20	11	32	13	31	21	12
19	SANANWETAN	REMBANG	11	6	3	4	10	5	2	13	0	1	4
20	SANANWETAN	KARANGTENGGAH	16	22	1	12	11	6	10	4	7	7	10
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	11	19	7	19	11	7	29	9	15	7	8
		JUMLAH	132	128	36	98	76	54	91	96	70	56	44
		KOTA BLITAR	410	337	210	202	199	174	167	164	157	101	98
	Persentase terhadap jumlah penduduk		0.27	0.22	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.07	0.06
	Urutan/Ranking		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PARAJI	TUKANG LISTRIK	BURUH_P ETERNAK AN	SENIMAN	PENATA_R AMPUT	PELAUT	PENATA_ RIAS	TUKANG_SOL_S EPATU	TUKANG_ CUKUR	LAINNYA	APOTEKER
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	0	6	2	9	4	3	1	3	2	2	4
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	4	6	10	7	1	2	1	1	0	0	0
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	5	13	6	4	2	3	1	0	2	1	1
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	1	2	1	4	6	1	3	2	2	0	4
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	64	1	6	1	5	3	2	1	0	0	0
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	0	3	1	1	3	3	4	10	2	0	1
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	1	3	0	7	3	2	2	1	1	2	1
		JUMLAH	75	34	26	33	24	17	14	18	9	5	11
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	2	3	2	0	6	4	3	3	3	6	1
9	SUKOREJO	BLITAR	0	4	0	2	1	5	1	0	4	0	2
10	SUKOREJO	TLUMPU	0	1	4	2	1	4	0	0	0	1	2
11	SUKOREJO	TURI	0	1	4	2	0	3	0	1	2	3	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	2	1	3	0	2	1	1	1	2	0	0
13	SUKOREJO	SUKOREJO	2	12	8	10	4	2	0	11	10	0	0
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	0	6	6	8	5	7	5	3	0	0	1
		JUMLAH	6	28	27	24	19	26	10	19	21	10	6
15	SANANWETAN	GEDOG	0	5	4	4	3	4	7	0	4	5	3
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	1	2	2	1	2	3	1	0	2	1	0
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	0	3	0	2	2	1	4	2	0	0
18	SANANWETAN	SANANWETAN	7	11	8	5	8	6	4	2	1	7	4
19	SANANWETAN	REMBANG	0	1	3	1	1	0	2	0	2	0	0
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	0	2	2	2	3	3	1	0	0	2	5
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	4	3	3	5	5	3	6	0	1	9	5
		JUMLAH	12	24	25	18	24	21	22	6	12	24	17
		KOTA BLITAR	93	86	78	75	67	64	46	43	42	39	34
	Persentase terhadap jumlah penduduk		0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	Urutan/Ranking		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDETA	WARTAWAN	USTADZ_M UBALIGH	JURU_MASAK	NELAYAN_P ERIKANAN	KONSULTAN	PENGACAR A	PENYIAR RADIO	PERANGKAT_ DESA	TUKANG_ GIGI
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	8	1	1	3	1	0	0	0	0	3
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	1	1	2	1	1	3	0	0	0	0
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	0	3	0	2	0	2	0	1	1	0
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	3	0	0	2	1	0	2	3	0	1
		JUMLAH	13	5	7	9	4	5	2	6	1	4
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	0	0	3	1	1	0	2	0	2	1
9	SUKOREJO	BLITAR	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0
10	SUKOREJO	TLUMPU	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11	SUKOREJO	TURI	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0
13	SUKOREJO	SUKOREJO	2	2	4	1	1	1	0	0	2	3
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	1	1	3	0	3	3	1	1	2	0
		JUMLAH	8	4	10	5	9	6	5	3	8	4
15	SANANWETAN	GEDOG	4	5	1	1	0	2	0	0	1	0
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0
18	SANANWETAN	SANANWETAN	2	2	2	4	2	2	4	4	1	0
19	SANANWETAN	REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	1	4	2	0	0	0	1	1	1	0
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	1	3	0	3	1	4	2	0	0	1
		JUMLAH	8	16	6	8	7	8	8	5	4	1
		KOTA BLITAR	29	25	23	22	20	19	15	14	13	9
		Persentase terhadap jumlah penduduk	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		Urutan/Ranking	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TABIB	ARSITEK	IMAM_MESJID	PASTOR	ANGGOTA_DPRD_KAB UPATEN_KOTA	NOTARIS	BURUH_NELAYA N_PERIKANAN	PENATA_B USANA	BIARAWATI	PERANCAN G_BUSANA
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	2	1	0	0	1	0	2	0	4	0
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
		JUMLAH	5	2	2	0	3	3	3	3	5	2
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	1	2	1	0	0	0	0	1	0	2
9	SUKOREJO	BLITAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SUKOREJO	TLUMPU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	SUKOREJO	TURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SUKOREJO	SUKOREJO	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
		JUMLAH	1	4	2	3	2	1	1	3	0	2
15	SANANWETAN	GEDOG	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	SANANWETAN	SANANWETAN	0	2	1	0	2	3	2	0	0	0
19	SANANWETAN	REMBANG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	0	1	2	5	0	1	0	0	1	0
		JUMLAH	3	3	4	5	3	4	3	0	1	1
		KOTA BLITAR	9	9	8	8	8	8	7	6	6	5
		Persentase terhadap jumlah penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		Urutan/Ranking	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PENTERJEMAH	PENELITI	PARANORMAL	AKUNTAN	PIALANG	PSIKIATER_ PSIKOLOG	ANGGOTA_MA HKAMAH_KO NSTITUSI	WALIKOTA	WAKIL_WAL IKOTA	PILOT
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH	2	0	0	1	0	2	0	0	1	1
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKOREJO	BLITAR	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
10	SUKOREJO	TLUMPU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	SUKOREJO	TURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SUKOREJO	SUKOREJO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		JUMLAH	1	2	5	1	3	0	0	0	0	0
15	SANANWETAN	GEDOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SANANWETAN	SANANWETAN	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SANANWETAN	REMBANG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	SANANWETAN	KARANGTENGGAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		JUMLAH	2	3	0	2	1	0	1	1	0	0
		KOTA BLITAR	5	5	5	4	4	2	1	1	1	1
		Persentase terhadap jumlah penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Urutan/Ranking	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PROMOTOR _ACARA	ANGGOTA_D PR_RI	ANGGOTA_DPD	ANGGOTA_BPK	PRESIDEN	WAKIL_PRESIDEN	ANGGOTA_KABI NET_KEMENTER IAN	DUTA_BESAR
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKOREJO	BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SUKOREJO	TLUMPU	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SUKOREJO	TURI	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SUKOREJO	KARANGSARI	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SUKOREJO	SUKOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SANANWETAN	GEDOG	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SANANWETAN	SANANWETAN	0	0	0	0	0	0	0	0
19	SANANWETAN	REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0
		KOTA BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase terhadap jumlah penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Urutan/Ranking	75	76	77	78	79	80	81	82

lanjutan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	GUBERNUR	WAKIL_GUBERNUR	BUPATI	WAKIL_BUPATI	ANGGOTA_DPR D_PROVINSI	PENYIAR_TE LEVISI	KEPALA_D ESA	JUMLAH PENDUDUK
1	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENKIDUL	0	0	0	0	0	0	0	8,163
2	KEPANJEN KIDUL	NGADIREJO	0	0	0	0	0	0	0	3,656
3	KEPANJEN KIDUL	SENTUL	0	0	0	0	0	0	0	8,096
4	KEPANJEN KIDUL	KAUMAN	0	0	0	0	0	0	0	6,686
5	KEPANJEN KIDUL	TANGGUNG	0	0	0	0	0	0	0	5,854
6	KEPANJEN KIDUL	BENDO	0	0	0	0	0	0	0	6,043
7	KEPANJEN KIDUL	KEPANJENLOR	0	0	0	0	0	0	0	5,934
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	44,432
8	SUKOREJO	PAKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	11,181
9	SUKOREJO	BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	4,768
10	SUKOREJO	TLUMPU	0	0	0	0	0	0	0	3,934
11	SUKOREJO	TURI	0	0	0	0	0	0	0	3,294
12	SUKOREJO	KARANGSARI	0	0	0	0	0	0	0	5,503
13	SUKOREJO	SUKOREJO	0	0	0	0	0	0	0	14,832
14	SUKOREJO	TANJUNGSARI	0	0	0	0	0	0	0	9,261
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	52,773
15	SANANWETAN	GEDOG	0	0	0	0	0	0	0	11,371
16	SANANWETAN	PLOSOKEREP	0	0	0	0	0	0	0	5,133
17	SANANWETAN	KLAMPOK	0	0	0	0	0	0	0	4,864
18	SANANWETAN	SANANWETAN	0	0	0	0	0	0	0	14,215
19	SANANWETAN	REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	3,222
20	SANANWETAN	KARANGTENGAH	0	0	0	0	0	0	0	7,695
21	SANANWETAN	BENDOGERIT	0	0	0	0	0	0	0	11,009
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	57,509
		KOTA BLITAR	0	0	0	0	0	0	0	154,714
		Persentase terhadap jumlah penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0000
		Urutan/Ranking	83	84	85	86	87	88	89	

p. Data TKI/TKW Kota Blitar

Penelusuran data TKI dan TKW di Kota Blitar dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Data CTKI Kota Blitar Tahun 2017

NO	ASAL KELURAHAN	NEGARA TUJUAN																		JUMLAH									
		TAIWAN		HONGKONG		SINGAPURA		JAPAN		KOREA SELATAN		BRUNAI DARUSALAM		QATAR		SAUDI ARABIA		KUWAIT			KYRGYZ		UEA		BAHRAIN		MALAYSIA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	
KEC. SUKOREJO																													
1	SUKOREJO		5		16		7					1										1				1	6	32	
2	PAKUNDEN		7		10		1			1																		19	
3	TURI	1	1		3					1															1		7		
4	BLITAR		3		2																				1		2	8	
5	KARANGSARI		4		7					2																	13		
6	TLUMPU		2		1		1																				4		
7	TANJUNGSARI	2	7		9		1			3																2	24		
JUMLAH		3	29	0	48	0	5	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	10	107	
		32		48		5		0		7		1		0		0		0		0		1		1		12			
KEC. SANANWETAN																													
1	REMBANG		5	1	1																					1	8		
2	SANANWETAN		6		7			1						1												1	16		
3	KARANGTENGAH	1	2		5					1	1														1	1	13		
4	BENDOGERIT		5		3					1	1																10		
5	KLAMPOK		5		5													1								1	12		
6	PLOSOKEREP		1		1		1																				3		
7	GEDOG	1	5		10		1					1														1	19		
JUMLAH		2	29	1	32	0	2	1	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	81	
		31		33		2		1		3		2		0		1		1		1		0		0		6			
KEC. KEPANJENKIDUL																													
1	KAUMAN		3		3	1	1				1															1	2	12	
2	KEPANJENLOR		4		3												1										1	9	
3	KEPANJENMIDUL	1	4		5					1				1													1	13	
4	NGADIREJO	1	1		6																						3	14	
5	BENDO	1	3		7																							14	
6	SENTOL	3	2		5		1					1	1														1	14	
7	TANGGUNG	1	1		3																							5	
JUMLAH		7	18	0	30	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	73
		25		30		3		0		2		2		1		1									0		9		
JUMLAH KESELURUHAN		12	76	1	110	1	9	1	0	9	3	3	2	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	9	18	261	
		88		111		10		1		12		5		1		2		1		1		1		1		77			

3.4. Program-program yang sudah dilaksanakan oleh OPD

Dalam pelaksanaan Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga, perlu pelibatan Perangkat Daerah dan tidak terkecuali peran dari masyarakat dan pihak swasta. Adapun keterkaitan bidang yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang mendukung terhadap ketahanan keluarga antara lain:

No	Perangkat Daerah	Katerkaitan dengan ketahanan keluarga
1	2	3
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB /DP3AP2KB	Terkait dengan penanganan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kota Layak Anak, pengarusutamaan gender, Partisipasi Keluarga Berencana, PKK, GOW, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2ATP2A)
2	Dinas Pendidikan	Terkait pelayanan pendidikan baik infrastruktur, pembelajaran, akses dan lain-lain.
3	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & PTSP	Terkait dengan pelayanan ketenagakerjaan, pelayanan perijinan yang menghasilkan ijin yang bertanggungjawab atau ramah keluarga/lingkungan, informasi terkait tenaga kerja ke luar negeri baik yang bersangkutan maupun keluarga.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terkait dengan pembinaan konsultan konstruksi yang ramah bangunan, penyediaan infrastruktur yang ramah semua
5	Dinas Perumahan Rakyat	Terkait dengan pelayanan permukiman yang layak dan sehat, pengentasan rumah tidak layak huni, penuntasan zero kawasan kumuh.
6	Dinas Perhubungan	Terkait pemenuhan sarpras perhubungan (penerangan jalan, rambu-rambu, fasilitas angkutan umum, angkutan sekolah), pembinaan terkait lalu lintas, penyediaan parker yang aman, nyaman dan murah dll
7	Dinas Kesehatan	Terkait dengan pelayanan kesehatan, pembinaan PHBS, obat-obatan, gizi, keamanan pangan, penyakit menular, penyakit tidak menular dll.
8	RSUD Mardi Waluyo	Terkait dengan pelayanan kesehatan, tindakan medis.
9	Dinas Lingkungan Hidup	Terkait layanan sampah, air limbah domestic dan , pertamanan,
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terkait layanan pembinaan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Terkait layanan pembinaan perkoperasian dll
12	Disperdagin	Terkait layanan perdagangan, industry, peredaran miras
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar	Terkait perngkoordinasian perencanaan program dan kegiatan OPD
14	Dinas Sosial	Terkait layanan PMKS, sosial

No	Perangkat Daerah	Katerkaitan dengan ketahanan keluarga
1	2	3
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkait layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Terkait layanan pariwisata, pembinaan seni dan budaya
17	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Terkait dengan layanan berbasis IT, pembinaan media sosial, pengaturan terkait wifi/hot spot dll
18	Bakesbangpol dan PBD	Terkait dengan kerukunan antar umat beragama, demikrasi, kewaspadaan dini, bela negara
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Terkait dengan pembinaan olahraga, fasilitas olah raga, pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan dll
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terkait dengan pembinaan dan layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, motivasi minat baca dll
21	Satuan Polisi Pamong Praja	Terkait dengan keamanan dan ketertiban umum (kos2san, café, warnet, karaoke, anak jalanan, dll), penindakan pelanggaran perda
22	Kecamatan	Terkait dengan layanan pemerintahan selaku yang mengkoordinasikan kewilayahan.
23	Perangkat Daerah Lainnya	Terkait dengan penyelenggaraan hiburan, acara ceremonial dll

Sumber: diolah Bappeda,2018

Program-program yang sudah dilaksanakan terkait dukungan ketahanan keluarga antara lain seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18. Program dan kegiatan OPD terkait dukungan ketahanan keluarga

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
A	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	DP3AP2KB	
1	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang aktif pada organisasi atau lembaga kemasyarakatan
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen PPRG
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang Terfasilitasi
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah peserta Workshop Perempuan Wirausaha
		Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang mengikuti Bimtek Pemanfaatan Pekarangan
		Jumlah Perempuan sebagai Peserta dalam Workshop Pemanfaatan Daur Ulang Sampah
		Jumlah Perdamsra (Perempuan berdayaguna mandiri dan sejahtera) yang mengikuti Workshop

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah peserta Pelatihan Olahsan Makanan
		Jumlah peserta Study Komperasi Bagi PEKKA
		Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Kartini
		Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Ibu
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif
2	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)
		Capaian median usia nikah pertama wanita
	Advokasi , Penggerakan dan Informasi tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang dibina /perlombaan
		Jumlah pembentukan Kampung KB
		Jumlah Peserta Kampanye KB Keliling
		Jumlah Fasilitasi Monev ADPIN
		Jumlah kader B yang mendapatkan Peningkatan Kesejahteraan Bagi PPKBD
		Jumlah Kader KB yang mendapatkan Insentif
	Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Masyarakat Penjaringan Calon Akseptor KB per Kelurahan
		Jumlah masyarakat yang terlayani pada safari KB gratis
		Jumlah Akseptor MOP yang terlayani
		Jumlah Akseptor MOW yang terlayani
		Jumlah pria yang mengikuti pembinaan KB Pria
		Jumlah Aplikasi yang dibuat untuk menunjang laporan pelayanan KB
		Jumlah peserta dalam launching KB Online
		Jumlah peserta monev program KB di masyarakat
	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta Rakerda KB
		Jumlah Fasilitasi Inisiasi Pembentukan KB Emas (RW, Kecamatan dan Kota)
		Jumlah fasilitasi kelompok siaga KB yang dibina
		Jumlah peserta workshop analisis kependudukan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Jumlah Peserta Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
		Jumlah peserta lomba dalduk yang dikirim tingkat provinsi
	Revitalisasi Program KB	jumlah sarana dan prasarana pendukung program KB

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelaksanaan KB di Kecamatan
3	Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB
	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	Jumlah peserta pembinaan Saka Kencana
		Jumlah kaos yang diberikan kepada pengurus saka kencana
		Jumlah Peserta Jambore Saka Kencana
		Jumlah Keluarga perwakilan dari Kecamatan yang mengikuti Perlombaan Keluarga Harmonis
		Jumlah kader tribina (BKB, BKR dan BKL) yang dibina
		Jumlah kader UPPKS yang dibina/mengikuti Workshop
		Jumlah peserta jalan sehat dalam rangka harganas
		Jumlah anggota Kelomok PIK R yang dibina
4	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih
		Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak
	Edukasi dan Publikasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta pada workhop KHA
		Jumlah peserta sosialisasi PPA
		Jumlah rute bis sekolah yang dilaksanakan Sosialisasi tentang PPA (5 Bus x 4 kali x 12 bln)
		Jumlah Pembangunan media informasi berbasis Web Situs KLA Kota Blitar
		Jumlah data yang terinput dalam Web KLA
		Jumlah fasilitasi Edukasi dan sosialisasi PPA di Sekolah se Kota Blitar
		Jumlah jenis Publikasi PPA (perlindungan Perempuan dan Anak)
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pelatihan Usaha Ekonomi Mikro
		Jumlah peserta Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
		Jumlah narasumber sosialisasi perlindungan perempuan dan anak dalam rangka MOS di berberbagai sekolah di Kota Blitar di Sekolah
		Jumlah leaflet yang dicetak
		Jumlah papan pengumuman di tempat umum yang dipasang

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah pengurus P2ATP2A yang mendapatkan bingkisan peningkatan kesejahteraan
		Jumlah Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
		Jumlah Fasilitasi KAsus PPA yang dilaporkan
		Jumlah Peserta pembekalan satgas PPA
		Jumlah pengurus P2ATP2A yang mengikuti rapat rutin
		Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak melalui Kegiatan Operasi Gabungan ketempat-tempat yang berpotensi penyebab terjadinya kekerasan
		Jumlah Fasilitasi Molin dan TORLIN
		Jumlah Anggota Satgas yang mengikuti Peningkatan Kapasitas
		Jumlah Rumah Aman yang terbangun
B	BIDANG PENDIDIKAN	
	Dinas Pendidikan	
1	Program Pendidikan Non Formal Dan PAUD	Tercapainya APK PAUD
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lomba bagi Penyelenggaraan HAN PAUD dan TK/SD
2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah lembaga penerima sarana prasarana edukatif PAUD
3	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Anak Usia Dini	Jumlah penyelenggaraan pengembangan minat, bakat dan kreativitas anak usia dini
4	Fasilitasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah terwujudnya kesejahteraan Guru PAUD
5	Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas
6	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Volume sarana dan prasarana bermain yang terbangun
7	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa PAUD Dan Nonformal	Jumlah lembaga penerima buku buku dan alat tulis siswa
8	Pengadaan pakaian olah raga siswa PAUD Dan Nonformal	Jumlah lembaga penerima pakaian olah raga
9	Pengadaan mebeler sekolah PAUD Dan Nonformal	Jumlah lembaga penerima mebeler sebagai sarana pembelajaran PAUD
10	Pengadaan perlengkapan sekolah PAUD Dan Nonformal	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia
11	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah PAUD Dan Nonformal	Volume bangunan sekolah yang terpelihara
12	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah PAUD Dan Nonformal	Jumlah ruang kelas sekolah yang terehab
13	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	Jumlah lembaga kursus yang bermutu dan berkualitas
14	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah tenaga life skill di lembaga kursus yang kompeten di bidangnya

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
15	Fasilitasi kreatifitas Pendidikan Non Formal	Jumlah pengiriman warga belajar PNF untuk mengikuti pameran di tingkat propinsi
16	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Khusus	Jumlah erwujudnya sarana dan prasara PLA
17	Fasilitasi pengembangan pendidikan kesetaraan	Jumlah Paket A, B dan C yang terfasilitasi
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah siswa PAUD dan Non Formal	Jumlah jenis perlengkapan sekolah siswa yang terpelihara
19	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD dan Non Formal	Jumlah gedung terbangun
20	Pengadaan Pakalan Seragam Sekolah Siswa PAUD dan Non Formal	Jumlah pakaian seragam sekolah siswa yang tersedia
21	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
22	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah SDM pendidik PAUD yang bermutu dan berkualitas
		Jumlah jenis lomba TK/ RA tingkat Kecamatan
		Jumlah lembaga TK Negeri yang mendapat biaya operasional
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka kelulusan SD/MI/Paket A
		Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B
		Persentase siswa yang tertampung jenjang SD sesuai SPM
		Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP sesuai SPM
		nilai UN/UASBN siswa SD diatas 70
		nilai UN/UASBN siswa SMP diatas 70
1	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah terbangunnya gedung sekolah
2	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah SD dan SMP	Jumlah lembaga penerima bantuan seragam dan sepatu
3	Pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
4	Pengadaan Pakaian Olahraga SD dan SMP	Jumlah pengadaan pakaian olah raga (seragam tanding, seragam kontingen) yang terpenuhi
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)	Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD DAK)	Jumlah pembangunan gedung dan alat peraga sekolah
7	Pengadaan mebel sekolah SD dan SMP	Jumlah mebel sekolah yang tersedia
8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia
9	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
10	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan tempat parkir	Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah) lomba UKS, duta tiwidasa dan lomba duta sanitasi) yang terfasilitasi
11	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Volume taman, lapangan upacara dan tempat parkir yang terbangun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
12	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD dan SMP	Volümet Bangunan Sekolah yang terehab
13	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Ibadah	
15	Pembangunan Kamar mandi / WC siswa	Volume Kamar mandi / WC siswa yang terbangun
16	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan	Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Sekolah	Jumlah perlengkapan siswa tersedia
18	Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Volume taman, lapangan upacara dan taman parkir yang terpelihara
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler sekolah	Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
21	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Volume bangunan sekolah yang terpelihara
22	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Volume Sarana Air Bersih dan Sanitary yang terbangun
23	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Volume Ruang Kelas Sekolah yang terbangun
24	Pembangunan Laboratorium dan praktikum sekolah	Volume Laboratorium dan praktikum sekolah yang terbangun
25	Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga	Volume Sarana dan prasarana Olah raga yang terbangun
26	Pembangunan Ruang serba Guna/Aula	Volume Ruang serba Guna/Aula yang terbangun
27	Rehabilitasi sedang/berat ruang serbaguna/aula	
28	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terehabilitasi
29	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah kegiatan kebutuhan BOS yang terfasilitasi: pembuatan RKAS, sosialisasi, pendataan siswa, pembinaan, pembuatan laporanakhir tahun, pembinaan penata usahaan barang
30	Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah) lomba UKS, duta tiwidasa dan lomba duta sanitasi) yang terfasilitasi
31	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	
32	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	jumlah sekolah yang mendapatkan biaya operasional madin se Kota Blitar
33	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah lembaga peserta pengembangan minat bakat, dan kreativitas siswa (O2SN,FLS2N Siswa berprestasi, lomba kreatifitas siswa, pekan seni siswa, Popda, porseni , kompetisi keolahragaan dan HAN siswa) yang terpenuhi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
34	Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa	Jumlah pengembangan kepribadian dan pembentukan mental spiritual yang terpenuhi bagi lembaga (test baca Qur'an, kantin ejujuran dan frekuensi pembentukan mental spiritual)
35	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru, berbagai macam ujian sekolah, dan try out / bimbingan peserta didik
36	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP	jumlah buku dan alat tulis siswa tersedia
37	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah sekolah yang terakreditasi
38	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah informasi pendidikan dasar yang tersebar dan tersosialisasi
39	monitoring ,evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring ,evaluasi dan pelaporan yang terlaksana
40	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	
41	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar yang terbina
C	BIDANG TENAGA KERJA DAN PERUMAHAN	
	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & PTSP	
	TENAGA KERJA	
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Ketenagakerjaan	persentase tenaga kerja yang ditempatkan
		Persentase fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah calon pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
	Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja	Jumlah tempat pelaksanaan survey KHL
		Jumlah Peserta Sosialisasi UMK
	Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Kasus Peselisihan Hubungan Industrial
		Jumlah paket sembako bersubsidi pada Pasar Murah
		Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Peraturan ketenagakerjaan
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)	persentase tenaga kerja terlatih
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang	jumlah pelatihan yang dilaksanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	ketenagakerjaan	
	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah BKK yang Dipantau dan Dibina
		Jumlah Perusahaan Peserta Bursa Kerja
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencari Kerja
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT	
	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah pendampingan program nasional
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
		Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik
		Prosentase tingkat hunian Rusunawa
	Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Dan Sosial	Jumlah rumah korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi
	Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab
	Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa	Jumlah sarana penunjang yang dibangun
	Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
	Sosialisasi Sarana Dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah peserta sosialisasi
	Operasional Pengelolaan Rusunawa	Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
		Jumlah rekening yang dibayar
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa	Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
D	BIDANG PERHUBUNGAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Terminal Barang/Cargo dalam Kondisi Baik
	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Fasilitasi Operasional Angk.Sekolah	Jumlah fasilitas armada angkutan sekolah gratis

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Fasilitasi Operasional Terminal Barang/Cargo	Operasional diterminal Barang/Cargo
	Pembangunan Halte dan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Jumlah halte dan tempat pemberhentian angkutan umum terbangun
	Rehab/Pemeliharaan Terminal Barang/Cargo	Jumlah Pemeliharaan diterminal Barang/Cargo
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas
	Penyusunan Norma, Kebijakan, standart dan Prosedur Pengendalian dan Pengamanan lalulintas	Jumlah norma kajian atau kebijakan lalu lintas
	Fasilitasi Pengamanan Lalulintas	Jumlah jenis pengamanan lalu lintas
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan Raya	- Jumlah Pembinaan dan Operasi Angkutan
		- Jumlah sosialisasi edukasi pendidikan lalu lintas
		- Jumlah sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas kepada pelajar pelopor, TK, SD
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan
	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir	Jumlah Juru parkir yang terfasilitasi
	Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi perparkiran
E	BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	
	DINAS KESEHATAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
	Perbaikan Gizi Masyarakat (2018)	Angka Kematian Balita (AKBAL) per-1.000
		Prevalensi balita gizi buruk
		Jumlah sasaran PMT pada anak Balita di Lembaga PAUD/TK/RA
		Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan
		Persentase bumil KEK mendapat PMT pemulihan
		Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium
		Persentase pemberian ASI Eksklusif
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan nifas

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Keluarga (2018)	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan anak Balita (usia 0-59 bulan) Persentase K1
	Peningkatan Kesehatan anak dan remaja (2018) Peningkatan kesehatan anak dan remaja Peningkatan Pelayanan Persalinan (Jampersal) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia (2018)	Persentase pelayanan kesehatan anak pra sekolah Jumlah sasaran parenting kesehatan reproduksi remaja Persentase pelayanan kesehatan dasar pada usia pendidikan dasar Jumlah peserta pelatihan peer conselor dan pembinaan remaja Jumlah peserta parenting class kesehatan reproduksi remaja Frekuensi rapat koordinasi dan bimbingan teknis kesehatan remaja Cakupan Anak dan Remaja yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan Jumlah fasilitasi rumah tunggu Jumlah fasilitasi kegiatan preventif dan promotif Frekuensi monev pelayanan kesehatan usia lanjut Jumlah sasaran orientasi pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri untuk petugas Puskesmas Jumlah sasaran bimbingan teknis peningkatan yankes Usila
2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang terakreditasi
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat (2018) Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (2018) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah jenis pengadaan obat PKD (2016 & 2017) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (2018) Persentase fasilitas sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi syarat Jumlah pemeliharaan alat kesehatan Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat Kota Blitar Persentase Pendataan Keluarga Sehat Jumlah jenis pengadaan kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	<p>Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium Kesehatan)</p> <p>Peningkatan kesehatan masyarakat</p> <p>Penyehatan Tradisional</p> <p>Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan (2016 & 2017)</p> <p>Standarisasi Pelayanan Kesehatan (2018)</p>	<p>Pengadaan Ambulans</p> <p>Pengadaan KIT Imunisasi</p> <p>Rehabilitasi Puskesmas Induk</p> <p>Jumlah pembangunan Pukesmas</p> <p>Jumlah sampel yang diperiksa</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana labkesda terpenuhi</p> <p>Frekuensi pelatihan pengobatan tradisional dan indra</p> <p>Frekuensi pertemuan dan pelayanan kesehatan jiwa</p> <p>Frekuensi kegiatan kebugaran anak sekolah, karyawan dan masyarakat</p> <p>Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Persentase tenaga kesehatan pelayanan kesehatan tradisional yang dibina</p> <p>Persentase Penyehat tradisional berijin</p> <p>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan</p> <p>Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi akreditasi Puskesmas</p>
	<p>Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis</p> <p>Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan</p> <p>Peningkatan Sumberdaya dan Perijinan Kesehatan</p>	<p>Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi PKP (Pelayanan dan Kinerja Puskesmas)</p> <p>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pembinaan</p> <p>Persentase Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis</p> <p>Jumlah jenis kegiatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan</p> <p>Frekuensi updating data SDM Kesehatan se-Kota Blitar</p> <p>Jumlah cetak aturan kepegawaian</p> <p>Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</p> <p>Jumlah fasilitas kesehatan yang dibina</p> <p>Jumlah tenaga kesehatan berijin yang dibina</p> <p>Jumlah jenis kegiatan peningkatan sumberdaya dan perijinan kesehatan</p>
3	<p>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat</p>	<p>Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin</p> <p>Cakupan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat</p>
4	<p>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT)</p>	<p>Persentase Sarana Prasarana pelayanan Kesehatan yang terpenuhi</p>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Penyediaan/ peningkatan / pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah sarana prasarana kesehatan yang terpenuhi Persentase Pembayaran JKN-PBID
5	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kelurahan siaga aktif stars Purnama dan Mandiri (PURI) Frekuensi kegiatan koordinasi Tim TKP2MI (Tim Pengendalian dan Jumlah sasaran pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan Persentase screening PTM bagi penduduk beresiko usia <15 tahun secara kumulasi Cetak leaflet keamanan pangan Kegiatan Koordinasi Tim TKP2MI Pengendalian dan Pengawasan Makanan Impor
6	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	Pembinaan dan Pengawasan tempat pengelola makanan jajanan Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan Persentase TPM yang dilakukan uji petik Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri (PURI) menjadi Taman Posyandu
	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (2018) Pengembangan Taman Posyandu dan Kelurahan Siaga	Persentase Posyandu Aktif Strata Purnama Mandiri (PURI) Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Madya Persentase Krida SBH yang terbentuk Jumlah jenis media promosi Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian kota sehat Jumlah dokumen kota sehat yang tersusun Persentase rumah sehat Jumlah kelurahan ODF Persentase TTU yang memenuhi syarat
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) Persentase penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) Jumlah Pos UKK yang terbentuk
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah raga	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah sasaran pengukuran kebugaran
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT Pelayanan pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase warga negara usia 15/59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Kelurahan UCI (<i>Universal Child Imunization</i>) Persentase pasien diare yang ditangani <i>Release From Treatment</i> (RFT) penderita kusta
	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Pembinaan kegiatan kesehatan indra dan fungsional, jiwa dan NAPZA	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase penemuan penderita pneumonia balita Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Angka Bebas Jentik (ABJ) Angka kejadian malaria Persentase bayi yang mendapat IDL Persentase imunisasi TT5 pada WUS (15-49) Persentase imunisasi DT pada anak kelas 1 SD Jumlah pembinaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah Persentase pemeriksaan kesehatan CJH Frekuensi pengiriman sampel Potensi KLB Jumlah Deteksi Dini PTM Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Persentase sekolah yang melaksanakan KTR Frekuensi layanan jiwa oleh psikiater Jumlah pembinaan kesehatan indera dan fungsional, jiwa dan NAPZA Frekuensi monitoring dan evaluasi kesehatan indera dan fungsional, jiwa dan NAPZA
	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO	
8	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT (2018)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Angka Kematian Balita (AKBAL) per-1.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Prevalensi balita gizi buruk
		Persentase pelayanan lansia sesuai standar
	Perbaikan Gizi Masyarakat (2018)	Jumlah sasaran PMT Pemulihan
		Jumlah sasaran PMT Penyuluhan
		Jumlah pembinaan upaya perbaikan gizi masyarakat
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (2018)	Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita
		Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah fasilitasi kegiatan preventif dan promotif
9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (2018)	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (2018)
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (2018)	Angka kontak peserta JKN FKTP
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (2018)	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (2017)	Jumlah jenis kegiatan preventif promotif (BOK)
10	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN (2018)	Persentase kelurahan siaga aktif stars Purnama dan Mandiri (PURI)
	Penyehatan Lingkungan (2018)	Jumlah fasilitasi penyehatan lingkungan Puskesmas
		Jumlah pembinaan penyehatan lingkungan
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT (2018)	Persentase warga negara usia 15/59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
		Persentase Kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)
		Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam
	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (2018)	Jumlah sasaran fogging focus
		Jumlah pengendalian vektor
	Peningkatan Imunisasi (2018)	Jumlah pembinaan peningkatan imunisasi
		Persentase pelayanan BIAS
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (2018)	Jumlah sasaran screening kesehatan anak dan remaja
		Jumlah pembinaan dan pencegahan penyakit tidak menular
UPTD PUSKESMAS KEC. KEPANJEN KIDUL		
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH (2018)	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda Kota
	Fasilitasi keberansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	
1	2	3	
13	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT (2018)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	
		Angka Kematian Balita (AKBAL) per-1.000	
		Prevalensi balita gizi buruk	
		Persentase pelayanan lansia sesuai standar	
		Perbaikan Gizi Masyarakat (2018)	Jumlah sasaran PMT Pemulihan
			Jumlah sasaran PMT Penyuluhan
			Jumlah pembinaan upaya perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (2018)	Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita
			Jumlah sasaran kelas ibu hamil
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (2018)	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (2018)	
		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (2018)	Angka kontak peserta JKN FKTP
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (2018)	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan
		Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (2017)	Jumlah jenis kegiatan preventif promotif (BOK)
15	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN (2018)	Persentase kelurahan siaga aktif stars Purnama dan Mandiri (PURI)	
		Pengembangan Taman Posyandu dan Kelurahan Siaga (2018)	Jumlah kelurahan siaga yang dibina
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2018)	Persentase Posyandu Aktif Strata Purnama Mandiri (PURI)
			Jumlah sasaran survey/kajian PHBS
			Jumlah jenis media promosi
		Penyehatan Lingkungan (2018)	Jumlah fasilitasi penyehatan lingkungan Puskesmas
16	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT (2018)	Jumlah pembinaan penyehatan lingkungan	
		Persentase warga negara usia 15/59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
		Persentase Kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	
		Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam	
		Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (2018)	Jumlah sasaran fogging focus
			Jumlah pengendalian vektor
		Peningkatan Imunisasi (2018)	Jumlah pembinaan peningkatan imunisasi
	Persentase pelayanan BIAS		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (2018)	Jumlah sasaran screening kesehatan anak dan remaja
		Jumlah pembinaan dan pencegahan penyakit tidak menular
	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN	
17	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Perbaikan Gizi Masyarakat (2018) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (2018) Peningkatan Kesehatan anak dan remaja (2018) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/2018	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Angka Kematian Balita (AKBAL) per-1.000 Prevalensi balita gizi buruk Jumlah sasaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Pemulihan Jumlah sasaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Penyuluhan Jumlah Sasaran Pembinaan upaya Perbaikan Gizi masyarakat Jumlah Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita Jumlah sasaran yang dilakukan pembinaan kesehatan remaja Jumlah fasilitasi kegiatan preventif dan promotif
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (2018)	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Angka Kontak peserta JKN FKTP
19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Taman Posyandu dan Kelurahan Siaga (2018) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2018)	Persentase kelurahan siaga aktif stars Purnama dan Mandiri (PURI) Jumlah kelurahan siaga aktif yang dibina Jumlah jenis media promosi
20	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (2018) Peningkatan Imunisasi Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (2018)	Persentase warga negara usia 15/59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) Persentase KLB Kelurahan yang ditangani < 24 jam Jumlah sasaran fogging fokus Jumlah pengendalian vektor Jumlah pembinaan peningkatan imunisasi Persentase imunisasi DT pada anak kelas 1 SD Jumlah sasaran screening kesehatan anak dan remaja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah pembinaan pdan pencegahan penyakit tidak menular
	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	
21	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	Persentase peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Alat Kesehatan
	Pengadaan Gedung RS (Silpa DBH Pajak Rokok)	Jumlah Unit Bangunan Gedung Rumah Sakit (Silpa DBH Pajak Rokok)
22	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Persentase peningkatan pencapaian SPM
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Mardi Waluyo	- Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Rumah Sakit (Bag. Umum)
		- Jumlah SDM yang mengikuti Diklat/Seminar/Simposium (Bag. Program dan Kepegawaian)
		- Jumlah Jenis Sarana Prasarana Rumah Sakit (Bid. Keperawatan)
		- Jumlah Jenis Alat Kesehatan (Bid. Pelayanan Medis)
		- Jumlah Jenis Obat-obatan Bahan Kimia Rumah Sakit (Bid. Penunjang Medis)
23	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)	Persentase peningkatan Jenis Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Paru dan Jantung
	Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Alat Kedokteran Jantung dan Paru
24	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial	Jumlah rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (perwali, SK, Juknis, Laporan)
	Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kajian (updating data) Bidang Sosial Kemasyarakatan
	Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi	Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
		Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)
	Dinas Lingkungan Hidup	
25	Program Konservasi dan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang

f

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Komunikasi Lingkungan	terkelola Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana Jumlah mata air yang dilindungi Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata
	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan	Fasilitasi saka kalpataru Jumlah peringatan hari lingkungan Jumlah kelurahan berseri tingkat kota Jumlah kelurahan berseri tingkat propinsi Jumlah peserta sosialisasi kelurahan berseri Jumlah lomba lingkungan yang terselenggara Jumlah kelurahan yang dibina dalam berseri
	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang dibina untuk program adiwiyata
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah sarana dan prasarana pendukung taman kehati
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Luas lahan yang dibebaskan Jumlah sarana prasarana konservasi mata air
	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah sarana prasarana yang terbangun
	Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota	Jumlah sarana prasarana taman kota yang disediakan
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana prasarana yang di bangun
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara
	Pengembangan taman rekreasi	- Jumlah sarana prasarana pelengkap taman rekreasi yang terbangun
	Penataan RTH	jumlah lokasi taman yang terbangun
	Pemeliharaan RTH	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara
	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah sarana untuk mengurangi emisi GRK Jumlah dan frekwensi peserta pembinaan kampung iklim
		Jumlah dan frekwensi rapat koordinasi penghitungan penurunan emisi GRK
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekwensi dan jumlah peserta pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
26	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Frekwensi dan jumlah lokasi pengujian effluen industri, IPAL domestik komunal, hotel, rumah sakit dan rumah makan/restoran
	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Frekwensi dan jumlah lokasi uji emisi incenerator Frekwensi dan jumlah lokasi uji udara ambien
	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah sarana prasarana pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
27	Program Pengelolaan Persampahan	Volume sampah terolah di TPA
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta Sosialisasi perda pengelolaan sampah
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah pengguna teknologi pengolahan sampah Jumlah sarpras teknologi yang disediakan
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarpras pengelolaan sampah yang disediakan
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana prasarana pengelola sampah yang dipelihara
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA	Jumlah sarana yang disediakan di TPA jumlah sarana prasarana di TPA yang dipelihara
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina Lomba bank sampah Peringatan hari sampah Jumlah peserta sosialisasi pembinaan bank sampah
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Luas penyapuan jalan protokol Jumlah lokasi kerja yang terlayani Jumlah bingkisan untuk pengirit sampah
28	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan usaha dan/kegiatan Penerbitan izin PPLH Penerbitan izin lingkungan Jumlah fasilitasi penerbitan dokumen izin lingkungan
	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Lomba kali bersih Gerakan bersih sungai Frekwensi dan jumlah sungai dan/atau yang dibersihkan Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan
	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup	Jumlah sarana lingkungan hidup yang tersedia

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina
	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
29	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Angka konsumsi energi
		Angka konsumsi protein
	Pembinaan Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif
	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Pengujian Keamanan Pangan Sampel Pangan Segar
	Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun
		Jumlah Pemantauan Harga dan Distribusi Pangan
		Jumlah Pendataan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Rumah Tangga
		Jumlah Peserta Pembinaan Kelompok Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
		Jumlah Pelaksanaan Lomba KRPL
		Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang tersusun
		Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pemberian Tambahan Gizi Penduduk Rawan Pangan
30	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN	Produksi ikan konsumsi
		Produksi ikan hias
		Produksi benih ikan
	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Manajemen Budidaya Perikanan
		Jumlah Pendataan Perijinan Usaha Pembudidaya Ikan
		Jumlah Peserta Pembinaan Perijinan Usaha Pembudidaya Ikan
		Jumlah Peserta Pendampingan Sertifikasi Mutu Usaha Budidaya Perikanan
		Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Ikan dan Pembuatan Pakan Ikan
		Jumlah Fasilitas Promosi Pemasaran Ikan Hias
	Pengolahan dan Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Jumlah Penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan
		Jumlah Peserta Lomba Masak Ikan Tk. Kota
		Jumlah Lomba Masak Ikan Tk. Provinsi
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Ikan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah Fasilitas Promosi Pemasaran Produk Ikan
		Jumlah Peserta Pendampingan Manajemen Mutu Produk Olahan Hasil Ikan
	Penyediaan Benih Ikan Bermutu dan Informasi Pemasaran	Produksi Benih Ikan di UPTD BBI dan PIAIH
		Jumlah Penyediaan Sarana Operasional BBI
		Jumlah Ketersediaan Informasi Pemasaran Ikan di UPTD BBI dan PIAIH
	PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja Bidang Perikanan
	PERTANIAN	
31	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN	Produktivitas Padi
		Produktivitas Jagung
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Air Tanah (Pintu Air)
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Kebun Yang Beroperasi Secara Penuh
		Jumlah Wisata Edukasi Pertanian Yang Terwujud
		Jumlah Kajian Penumbuhan Kebun Pertanian Unggulan Kecamatan (Konsep One Village One Product)
	Pengolahan dan Pengembangan Usaha Hasil Pertanian	Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Pertanian
		Jumlah Pemilik Usaha Pertanian Yang Mendapat Sosialisasi / Pembinaan Perizinan Pertanian
		Jumlah Kegiatan Promosi Produk Hasil Pertanian Unggulan
		Jumlah Peserta Lomba Pangan Olahan Tk. Kota
	Peningkatan Kemampuan SDM Pertanian	Jumlah Dokumen Program Penyuluhan Pertanian dan Monografi Pertanian yang Tersusun
		Jumlah Demonstrasi Plot (Demplot) Percontohan Pertanian Yang Dibina Oleh Penyuluh
		Jumlah Peserta Pendampingan dan Penilaian Atas Kelompok Petani
		Jumlah Peserta Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
		Jumlah Pembinaan Lembaga Petani

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pendampingan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
		Jumlah Peserta Monev Distribusi Pupuk
		Jumlah Peserta Monev Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan), Obat Tanaman dan Benih Pertanian
		Jumlah Peserta Rakor Komisi Pemantau dan Pengawas Pupuk (KP3)
		Jumlah Peserta Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)
		Jumlah Dokumen Pendataan Lahan dan Irigasi
		Jumlah Peserta Rakor Mutasi Lahan Pertanian
	PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Bidang Pertanian	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja Bidang Pertanian
32	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Produksi Daging
		Produksi Telur
		Produksi Susu
	Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan	Jumlah Penyediaan Obat - obatan Hewan
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan
		Jumlah Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan
		Jumlah KIE Kesehatan Hewan Ke Masyarakat
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peserta KIE Penerapan Kesejahteraan Hewan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Betina Produktif
		Jumlah Pengujian Sampel Keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)
		Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Hewan Qurban
		Jumlah Penyediaan Bahan Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet
	Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Peternak
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peternakan
		Jumlah Survey Pendataan dan Pengawasan Peredaran Pakan Ternak, Obat Hewan dan Produksi Telur
		Jumlah Pendataan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Penyediaan Produk Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah Hewan Yang Dipotong di RPH Yang Dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
		Jumlah Peserta Pembinaan Rutin Mitra RPH
		Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk RPH-U
33	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PETERNAKAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Bidang Peternakan	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja Bidang Peternakan
F	BIDANG EKONOMI DAN PERTANIAN	
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang aktif
	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UM yang terfasilitasi akses pemasarannya
	Pengkajian Pembentukan BLUD/UPTD	Jumlah dokumen hasil kajian dampak regulasi nasional terhadap koperasi dan Usaha Mikro
	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan updating data usaha mikro
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina
	Bimbingan teknis pengelolaan Koperasi	Jumlah peserta bimtek penilaian kesehatan koperasi
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi peserta jejaring kerja
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi	Jumlah Koperasi Peserta Bimtek
	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi peserta Motivasi kerja
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta bimtek/sosialisasi perkoperasian
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi yang mampu berkembang
	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi pemingkatan koperasi
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan bagi usaha mikro
	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah UM yang mengikuti pameran produk
	Disperdagin	
	Urusan Perdagangan	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Penguatan PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas
	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
		Jumlah PKL yang didata
	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah Usaha Perdagangan yang Dibina
		Jumlah Unit Sarpras Perdagangan non Pasar yang Difasilitasi
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik
	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah Bangunan Pasar yang dibangun dan direvitalisasi
6	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Perdagangan	
	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Promosi Perdagangan
7	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Kebutuhan Pokok, Penting dan Minuman Beralkohol	Informasi Harga dan Stok Bahan Pokok
		Jumlah masyarakat/pelajar yang telah memperoleh sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol
8	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah industri kecil yang dilatih
	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	
9	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP
	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin Bagi Industri Kecil dan Menengah dan Penerapan Good Manufacturing Practises bagi Industri Hasil Tembakau	Jumlah Pengusaha Industri Hasil Tembakau yang Mengikuti Penerapan GMP (Good Manufacturing Practice)
G	BIDANG SOSIAL	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya (Fasilitas SKPD Pengampu bidang Sosial Budaya)
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD
	Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan teknologi	Jumlah fasilitas bidang inovasi dan teknologi
	Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah fasilitas litbang bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah
	Kajian Litbang bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Kajian litbang bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan yang dihasilkan
	Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Kajian litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dihasilkan
	Koordinasi Litbang bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah fasilitas litbang bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Fasilitas Pengembangan Inovasi Daerah (Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)
	Dinas Sosial	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
	Kegiatan Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta pembinaan PKH
	Kegiatan Fasilitasi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang sakit atau menerima musibah lain yang menerima sembako
		Jumlah warga miskin yang mendapatkan tambahan kesejahteraan
		Jumlah data PBI JKN yang terverifikasi
		Jumlah siswa SMA/SMK miskin yang menerima bantuan study kit
	Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rastra/BPNT	Jumlah warga miskin yang menerima bantuan beras
	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School
		Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan
		Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana
		Jumlah peserta bimtek relawan kebencanaan
		Jumlah pemeliharaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana
	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS
3	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti kegiatan HLUN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
		Jumlah peserta pembinaan Karang werda/Lansia
		Jumlah peserta sarasehan Lansia
		Jumlah karang Werda yang mengikuti lomba KW berprestasi
	Kegiatan Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial	Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti tetirah di PSPA Batu
		Jumlah fasilitasi adopsi anak
	Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-Orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Jumlah PMKS (psikotik/eks psikotik/terlantar) yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat lanjutan ke pusat rehabilitasi/panti/yayasan/pndok/rumahnya/ dll
		Jumlah klien hasil razia/penjaringan gepeng/PMKS lainnya yang dibina
		Jumlah pelayanan/pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal
		Jumlah psikotik yang bebas pasung
		Jumlah fasilitasi PMKS terlantar selama pengobatan/perawatan di rumah sakit/pusat rehabilitasi/yayasan/pondok/rumahnya dll
		Jumlah peserta pelatihan penanganan psikotik
		Jumlah peserta gelar informasi penanganan PMKS
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial
	Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna dan LKSA yang mengikuti bimtek
		Jumlah PSM yang mengikuti Bimtek
		Jumlah peserta Bimtek Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pertuni, PWRI dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan
		Jumlah anak yatim yang mengikuti peringatan tahun baru Islam
	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina
	Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan	Jumlah peserta peringatan HUT PETA
		Jumlah peringatan hari Pahlawan
		Jumlah peserta sarasehan kepahlawanan
		Jumlah peserta lomba melukis
		Jumlah perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran
	Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
5	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS terlatih

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja dan masyarakat di Bidang Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan
	Bantuan Sosial	
	1. kepada anggota masyarakat	
	2. Rumah Tidak Layak Huni	
	3. Santunan Kematian	
	4. Tidak Terencana	
	5. Santunan Anak Yatim	
	6. BKSM	
H	BIDANG PELAYANAN DAN KEMASYARAKATAN	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah jenis peralatan penerbitan dokumen KIA
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling	Jumlah kegiatan Pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen KK, KTP, KIA secara mobiling
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah rapat rapat monitoring dan evaluasi adminduk
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk **	Jumlah jenis sanpras pendukung pelayanan adminduk
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk (KTP, SKTT, KTP orang asing, dan KK)
2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian, Pengesahan dan pengakuan dan pengangkatan anak	jumlah dokumen akte Kelahiran Kematian, Pengesahan anak, pengakuan dan pengangkatan anak yang diterbitkan
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian	Fasilitasi petugas pelayanan 7 orang
	Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya pengelolaan arsip akta pencatatan sipil
	Legalisasi dokumen akte pencatatan sipil	Terlaksananya legalisasi akta pencatatan sipil
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase validitas data kependudukan
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK) **	Jumlah jenis sosialisasi media elektronik
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan sosialisasi
	Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) Secara Terpadu	Jumlah prasarana pendukung SIAM

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
4	PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN	Prosentase profile kependudukan Kota Blitar
	Penyusunan Profil Kependudukan Kota	Jumlah jenis buku
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pengelolaan Data Base Kependudukan	jumlah jenis pengolahan sistem informasi adminduk secara terpadu
	Updating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar	Jumlah fasilitasi update data NIK
	Disparbud	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Jejaring
		Persentase jumlah wisatawan yang menginap
	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah Pemantapan koordinasi dengan pelaku Wisata,Stakeholder Pariwisata dan Pokdarwis Pariwisata Kota Blitar
	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata Kota Blitar yg dibina
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta pemilihan Kangmas Diajeng.
		Jumlah peserta one day english.
		Jumlah pelaku usaha berbasis ekonomi kreatif
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah keikutsertaan pameran MTF yang terfasilitasi
		Jumlah media sarana promosi pariwisata yang digunakan
	Pembinaan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pembinaan usaha berbasis ekonomi kreatif
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah daerah asal wisatawan
	Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta Festival Wisata Kuliner Blitar.
		Jumlah Peserta Festival Ekraf Kota Blitar
	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta usaha berbasis ekonomi kreatif yang dilatih
	Dishub	
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Terminal Barang/Cargo dalam Kondisi Baik
	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Fasilitasi Operasional Angk.Sekolah	Jumlah fasilitas armada angkutan sekolah gratis
	Pembangunan Halte dan Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Jumlah halte dan tempat pemberhentian angkutan umum terbangun
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Penyusunan Norma, Kebijakan, standart dan Prosedur Pengendalian dan Pengamanan lalulintas	Jumlah norma kajian atau kebijakan lalu lintas
	Fasilitasi Pengamanan Lalulintas	Jumlah jenis pengamanan lalu lintas
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan Raya	- Jumlah Pembinaan dan Operasi Angkutan
		- Jumlah sosialisasi edukasi pendidikan lalu lintas
		- Jumlah sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas kepada pelajar pelopor, TK, SD
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir	Jumlah Juru parkir yang terfasilitasi
	Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi perparkiran
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar	
9	Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang aktif
	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan updating data usaha mikro
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina
	Bimbingan teknis pengelolaan Koperasi	Jumlah peserta bimtek penilaian kesehatan koperasi
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi peserta jejaring kerja
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi	Jumlah Koperasi Peserta Bimtek
	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi peserta Motivasi kerja
	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang memanfaatkan informasi modal koperasi
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta bimtek/sosialisasi perkoperasian
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi yang mampu berkembang
	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi pemeringkatan koperasi
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang Usaha Mikro	Jumlah peserta pelatihan bagi usaha mikro
	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah UM yang mengikuti pameran produk

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & PTSP	
	URUSAN PENANAMAN MODAL	
	PENANAMAN MODAL	
12	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Penerbitan Izin sesuai SOP
	Pemrosesan Pelayanan Perizinan Daerah	Jumlah izin yang terbit
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis media sosialisasi
	Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi perizinan
	Satuan Polisi Pamong Praja	
13	PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur
		Persentase poskamling aktif
	Kegiatan Pelatihan Kesipasiagaan dan Tamggap Darurat Bagi Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Daerah	Jumlah laporan hasil patroli sistem keamanan lingkungan
	Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi aset statis pemkot blitar yang diamankan
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara
		Jumlah laporan patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Kegiatan Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta event terkait polisi pamong praja
14	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase korban kebakaran yang tertangani
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah laporan hasil pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
		Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang tersedia
	Kegiatan Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk	Jumlah hydrant yang terpasang
	Bakesbangpol dan PBD	
15	PROGRAM PEMBAURAN DAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN (2018)	Persentase penduduk usia 14-59 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan
	Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi FKUB (2018)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Kegiatan pentas seni dan budaya, festival , lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlahfasilitasi kegiatan korp musik kota blitar(2018)
	Kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	jumlah peserta pendidikan dan latihan kader bela negara (2018)
	Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan (2018)
	Kegiatan Fasilitasi Forum pembauran kebangsaan (2018)	jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan
	Kegiatan Fasilitasi kelompok kerja pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK)	jumlah kelompok kerja usat pendidikan wawasan kebangsaan di kota blitar
16	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (2018)	persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani
	Kegiatan Fasilitasi Forum komunitas Pimpinan Daerah (FORKOPINDA)	FORKOPINDA dengan unsur terkait (jumlah pertemuan yang terfasilitasi)
	Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran akan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba
	Kegiatan penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing	jumlah pengawasan / pengendalian orang asing, tenaga asing , lembaga asing
	kegiatan Fasilitasi pengamanan kegiatan daerah	jumlah fasilitasi pengamanan kegiatan daerah , keagamaan, tamu VIP, patroli wilayah
	Kegiatan Fasilitasi SATLAK P4GN	jumlah peserta sosialisasi
	Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah sosialisasi koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)2018
17	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN SOSIALISASI TENTANG MITIGASI BENCANA
	Kegiatan pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	jumlah peserta sosialisasi pencegahan dini penanggulangan bencana alam (2018)
	Kegiatan Fasilitasi PUSDALOP PBD dan kel. Tangguh bencana	jumlah koordinasi PUSDALOP kel. Tangguh bencana dan sekolah aman bencana (2018)
	Kegiatan Pelatihan SAR Tanggap Darurat Bencana	jumlah peserta pelatihan SAR Tanggap darurat bencana (2018)
	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam	jumlah jenis pengadaan peralatan evakuasi korban bencana alam
	Dispora	
	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Aktif
	Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Pemuda yg mendapatkan penyuluhan narkoba
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terselenggara

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Kegiatan Peningkatan Kelmanan & Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan yang terselenggara
	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda dalam Pelatihan Ketrampilan
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina
	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat daerah	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga yang Terselenggara
	Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pembinaan OR yg ada di Masyarakat Yg Terselenggara
	Kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarpras OR Yg Dipelihara dengan Baik
	Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia & Penyandang Cacat	Jumlah Pembinaan Lansia & Peyandang Cacat/Difabel Melalui OR yg Terselenggara
	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah OR Rekreasi yang Terselenggara
	Peningkatan Jumlah & Kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Jumlah Pelatihan Wasit / Pelatih Olahraga
	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Usia Sekolah	Jumlah Penyelenggaraan Kompestisi OR Usia Sekolah yang Terselenggara
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	
20	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Persentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian
	Kegiatan Pembangunan database informasi kearsipan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan
		Jumlah fasilitasi pembangunan dan pengembangan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)
		Jumlah laporan hasil Survey SKM Kearsipan
	Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip inaktif daerah yang dilakukan pendataan dan penataan
		Jumlah arsip kacau yang dilakukan pengolahan
		Jumlah kegiatan relokasi depo arsip
		Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media
		Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui fumigasi dan termit control
		Jumlah fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah, penyusunan Citra Daerah
	Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah peserta Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan
		Jumlah fasilitasi penyusunan rumusan / rancangan kebijakan kearsipan, Monev kearsipan, peningkatan kapasitas SDM Kearsipan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
	Kecamatan	
	Urusan Penunjang	
21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Presentase pelayanan tepat waktu
	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah buku IKM, Jumlah P3N/Modin yang difasilitasi, Jumlah peserta Sosialisasi, Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan, Jumlah peserta Lomba Pelayanan
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
	Fasilitasi Kelurahan Berhasil Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi kelurahan berhasil
	Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah peserta rakor penanggulangan kemiskinan
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan monev PPMK
	Fasilitasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah wajib pajak yang membayar PBB, Jumlah peserta lelang bengkok, Jumlah peserta sosialisasi
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan difasilitasi
	Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah patroli yang dilaksanakan, Jumlah peserta forum keamanan dan ketertiban masyarakat, Jumlah peserta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah tim lomba PBB, Jumlah tim cerdas cermat antar Poskamling
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kelompok yang mengikuti pameran
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah lokasi prokasih
	Penyelenggaraan musrenbang RKP di kecamatan dan kelurahan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKP tingkat Kecamatan/kelurahan
	Kelurahan	
23	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Presentase pelayanan tepat waktu
	Fasilitasi Pelayanan Prima	Jumlah Buku IKM, Jumlah Fasilitasi Pelayanan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3
24	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
	Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasana
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan difasilitasi
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pameran, Jumlah Peserta Pelatihan Memasak
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah Peserta Kerja Bakti, Jumlah Kelompok Peserta Lomba Lingkungan
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dan kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan

Sumber: Diolah Bappeda, 2018

3.5. Peraturan yang sudah dibuat terkait perlindungan anak, perempuan dan keluarga.

Tabel 3. 19.
Peraturan Daerah yang diterbitkan di Kota Blitar Tahun 2012 - 2016

No.	Nomor PERDA/PERKADA	Tentang
	Tahun 2011	
1.	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar
2.	Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 675 / Hk / 410.010.2 / 2011	Kelompok Kerja Operasional Dan Kelompok Kerja Posyandu Se - Kota Blitar Periode Tahun 2011 - 2016
	Tahun 2015	
1.	Perda No. 1 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Perda No. 2 Tahun 2015	Pencabutan peraturan daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
3.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2015	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar
4.	Peraturan Walikota Blitar	Standar Prosedur Pelayanan Dan Penanganan

No.	Nomor PERDA/PERKADA	Tentang
	Nomor 9 Tahun 2015	Pengaduan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
5.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
6.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2015	Pedoman Umum Pendataan Keluarga Miskin Di Kota Blitar
7.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Dan/Atau Piatu Di Kota Blitar
8.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2015	Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak
9.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2015	Program Menuju Kantin Sehat Sekolah Di Kota Blitar
	Tahun 2016	
1.	Perda No. 2 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021
2.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2016	Perlindungan Anak
3.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
	Tahun 2017	
1.	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017	Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
2.	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017	Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2016	Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (Rad-Kla) Kota Blitar Tahun 2016-2020
4.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2017	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kota Blitar Tahun 2016-2020
5.	Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2014 Tentang fasilitasi biaya perkawinan warga Kota Blitar

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2017.

BAB IV

ANALISA MASALAH KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BLITAR

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

4.1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994).

A. Komponen Ketahanan Keluarga

Komponen ketahanan keluarga menurut Otto, Mc Cubbin 1988 yaitu:

1. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga;
2. Ikatan emosi yang kuat
3. Saling menghormati antar anggota keluarga;
4. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga;
5. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak;
6. Komunikasi efektif;

7. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif;
8. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga;
9. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga;
10. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman;
11. Mencintai dan mengerti;
12. Komitmen spiritual;
13. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Dari hasil telaahan bahwa hal-hal yang mempengaruhi ketahanan keluarga diantaranya adalah adanya permasalahan sosial atau sebaliknya.

Ada enam faktor resiko yang berpotensi memunculkan ancaman ketahanan keluarga atau disebut kerentanan dalam keluarga menurut Ariel Kalil (2003) yaitu kemiskinan, pengangguran, perceraian, kematian, penyakit kronis, dan ketidaksuburan reproduksi. Sedangkan Eldridge (1994) menambahkan faktor perkembangan teknologi, sosial, budaya dan politik sebagai sumber stres kolektif yang secara langsung mempengaruhi kehidupan serta kondisi keluarga.

4.1.1. Masalah Sosial dan Penyakit Sosial di Kota Blitar

Beberapa faktor atau penyebab terganggunya Ketahanan Keluarga disinyalir sebagian besar dipengaruhi oleh masalah sosial. Sedangkan masalah sosial dapat menimbulkan penyakit sosial.

a. Masalah Sosial di Kota Blitar

Masalah sosial di Kota Blitar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan di Kota Blitar tahun 2016 menempati urutan ke 7 terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 7,18%. Tingkat kemiskinan di Kota Blitar pada tahun 2016 berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 12,05% dan juga di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,9%. Namun pada Tahun 2017, tingkat

kemiskinan di Kota Blitar mengalami kenaikan yaitu pada angka 8,03% dan Provinsi Jawa Timur 11,77%.

- Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kota Blitar sebanyak 11.220 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 154.714 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur mencapai angka 4.405.270 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 39,293 jutajiwa dengan demikian Kota Blitar memberikan kontribusi sebesar 0,25% terhadap total jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur pada tahun 2017.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Blitar pada tahun 2017 sebesar 0,93%. Nilai Indeks ini masih cukup bagus karena berada di bawah nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 2,09% dan nasional 1,79%.

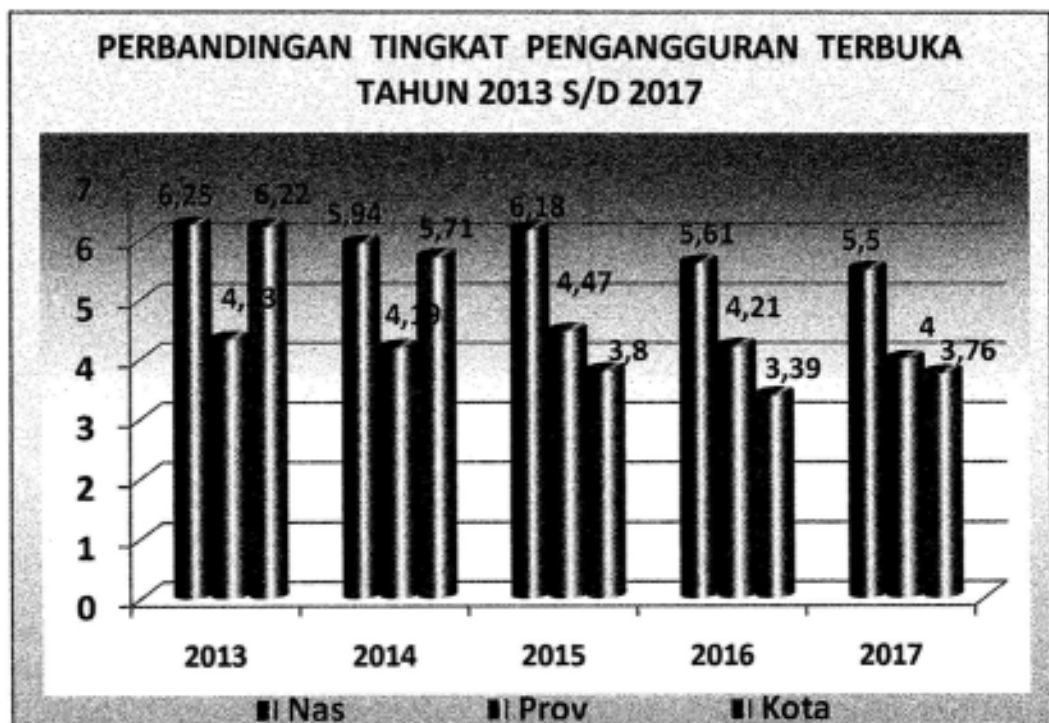
2. Masalah Pengangguran

Berdasarkan data Statistik di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar Tahun 2016, persentase lulusan SMK mencapai 35 persen dan untuk persentase pengangguran lulusan SMA mencapai 17 persen dari total 2.866 jumlah warga Kota Blitar yang menganggur. Hal ini dimungkinkan karena setiap lulusan SMA SMK di Kota Blitar cenderung memilih dalam menentukan pekerjaannya karena mereka berpikir dengan lulusan pendidikan strata SMA/SMK harus mendapatkan pekerjaan yang sebanding dengan ijazahnya. Kondisi di Kota Blitar yang didominasi dengan lapangan pekerjaan jenis perdagangan diduga tidak diminati bagi lulusan SMA SMK dengan alasan gengsi. Dari jumlah itu diketahui sebagian mereka yang menganggur akhirnya memilih untuk bekerja di luar kota terutama untuk jenis pekerjaan selain bidang perdagangan.

Disisi lain, tumbuhnya usaha kuliner dan menjamurnya pedagang

kaki lima (PKL) turut mengurangi tingkat pengangguran di Kota Blitar. Secara tidak langsung, hal-hal tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dat yang dirilis dari BPS tingkat pengangguran terbuka di Kota Blitar terakhir masih tahun 2015 sebesar 3,8% dengan jumlah total 2.866 jiwa yang terdiri dari 1.668 laki-laki dan 1.198 perempuan. Sedangkan data Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 pada angka 5,61% dan 4,21%. Grafik dibawah menjelaskan perkembangan Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Blitar pada tahun 2013 sampai dengan 2017.



Sumber : BPS Kota Blitar, 2018

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerjadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar melakukan berbagai usaha dalam upaya mengurangi angka pengangguran, antara lain yaitu dengan mengadakan bursa kerja.

3. Masalah Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan cenderung disebabkan oleh masalah kependudukan. Secara umum terkait kependudukan dan keluarga berencana di Kota Blitar cenderung stabil, yaitu laju pertumbuhan penduduk Tahun 2017 adalah 0.63 dengan jumlah penduduk 154.714 jiwa. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk maka masalah lingkungan tidak bisa dihindari sehingga membutuhkan strategi pengelolaan lingkungan baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Masalah lingkungan hidup yang masih dirasakahn di Kota Blitar adalah adanya pencemaran sungai oleh sampah dan air limbah domestik. Kepedulian masyarakat Kota Blitar dirasa kurang dalam menjaga kebersihan sungai.

4. Masalah Kenakalan Remaja

Masalah kenakalan remaja yang ada di Kota Blitar antara lain merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, sering membolos, hamil di luar nikah/sex bebas.

➤ *Ada 4 faktor penyebab masalah sosial secara umum antara lain:*

1. Faktor ekonomi

Faktor ini berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Hal ini karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang.

2. Faktor Budaya

Faktor ini disebabkan karena adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada.

3. Faktor Biologis

Faktor ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya.

4. Faktor Psikologis

Factor ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat.

b. Penyakit Sosial di Kota Blitar

Dari beberapa masalah sosial diindikasikan berkembang dengan adanya penyakit sosial.

➤ Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit sosial di Kota Blitar antara lain:

1. Kurangnya figure atau keteladanan

Kurangnya figure yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat terutama dalam keluarga. Dengan demikian, apa yang dirasa benar, akan dilakukan terus-menerus tanpa mempedulikan apakah hal itu melanggar norma atau tidak.

2. Kurangnya penanaman keagamaan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari sehingga muncul perilaku-perilaku yang tidak seharusnya seperti suka bersikap kekerasan baik secara fisik maupun psikologis.

3. Keadaan keluarga yang kurang harmonis.

Keadaan keluarga yang tidak bisa memberikan ketenteraman dan kebahagiaan pada anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga tidak bisa saling melakukan kendali atas perilakunya. Akibatnya setiap anggota keluarga cenderung berperilaku semaunya, dan mencari kebahagiaan di luar keluarga. Ia tidak menyadari lagi, apakah perilakunya itu melanggar norma-norma kemasyarakatan atau tidak, yang penting mereka merasa bahagia.

4. Terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Seseorang yang bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya, lambat laun

akan mengikuti seperti yang dilakukan teman-teman sekelompok dengannya.

5. Kurangnya control dan pengendalian terhadap pengaruh kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi melahirkan berbagai alat komunikasi dan alat hiburan yang serba canggih. Televesi (TV) dan internet merupakan hasil kemajuan teknologi. Program (acara) televise tidak semuanya cocok untuk konsumsi anak-anak yang belum dapat mengelola emosi dan kebijaksanaan. Tetapi banyak anak-anak menikmati acara TV yang seharusnya bukan konsumsinya. Misalnya: acara TV film keras, menyebabkan anak berperangai keras. Perangai keras ini dapat menimbulkan perilaku keras pada anak tersebut yang cenderung menyimpang dari kebiasaan masyarakat.

Interet dapat disalahgunakan untuk mendapatkan gambar-gambar porno. Akibatnya anak-anak yang belum cukup umur sudah menikmati gambar-gambar porno. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Besar kemungkinan anak akan berperilaku seks yang menyimpang. Atau bahkan orangtua pun dapat terkena virus ini juga. Ini berarti seseorang atau anak telah terkena penyakit sosial.

Kurangnya control dan pengendalian terhadap penggunaan media sosial sehingga kecenderungan kecanduan media sosial baik bagi anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Bahkan ada sebutan penyakit psikis yang trend akibat media sosial yang disebut dengan Sindrom FoMO (Fear of Missing Out). FoMO adalah sebuah gejala psikologis takut ketinggalan berita terbaru. Istilah zaman now "takut gak update". Hal ini menjadi peluang besar masuknya pornografi dari media sosial. Anak-anak dan remaja cenderung kurang dalam pendidikan etika dan moral dengan adanya kecanduan media sosial.

6. Maraknya tempat kos yang disalahgunakan fungsinya.

Tempat kos semakin berkembang di Kota Blitar, dan hal ini memerlukan pengawasan yang intensif dari pihak berwenang karena sudah beberapa kali ditemukan tempat kos yang digunakan membolos oleh pelajar dan melakukan hal-hal yang kurang baik di tempat kos tersebut.

➤ *Dampak Penyakit Sosial adalah:*

1. Bagi Pelaku:

- Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.
- Menghancurkan masa depan pelakupenyakit.
- Menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa.
- Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.

2. Bagi Orang Lain/Kehidupan Masyarakat:

- Mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat.
- Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat.
- Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku.
- Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

➤ *Penyakit sosial di Kota Blitar antara lain:*

1. Miras (minuman keras)

Masih ada laporan remaja yang ditanggap karena minuman keras atau mabuk-mabukan. Karena pemabuk biasanya kehilangan rasa

malu, tindakannya tidak dapat terkontrol hingga melakukan hal-hal yang sudah melanggar aturan dari masyarakat. Selain itu minuman keras juga sangat berbahaya ketika dikonsumsi dalam jangka panjang yaitu menimbulkan kecanduan sehingga bisa meninggal karena rusaknya lambung dan hati diakibatkan efek samping dari alkohol. Disamping itu juga masih ada laporan perdagangan miras tanpa ijin.

2. Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya

Masih ada laporan terkait penggunaan obat terlarang ini di Kota Blitar. Bahkan ditemui fenomena Inhalen yaitu salah satu bentuk tindakan menyimpang, seperti menghirup cat, lem, tiner, dan lainnya untuk mendapatkan perasaan fly atau senang sementara.

3. Perilaku Seks di luar nikah

Perilaku seks yang dilakukan di luar nikah tak hanya ditentang oleh norma sosial, namun juga dalam ajaran agama. Perilaku ini dilakukan oleh pria dan wanita yang belum atau tidak memiliki ikatan yang resmi. Sehingga dampak negatif yang bias terjadi adalah anak yang lahir di luar pernikahan, terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS, serta turunnya moral dari pelaku. Kasus hamil remaja hamil di luar nikah mengalami peningkatan, termasuk adanya PMS yang menjangkiti anak/remaja usia SD.

4. PSK (Pekerja Seks Komersial) dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) serta perilaku seks menyimpang lainnya.

- PSK

Dapat dikatakan jika PSK adalah bentuk dari penyakit sosial tertua yang ada di dunia. Bahkan kegiatan ini sebenarnya sudah ada dari jaman Romawi Kuno. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyakit sosial ini, namun tetap saja praktik prostitusi banyak beredar di masyarakat. Baik itu secara terselubung atau pun terbuka.

Umumnya, hal ini biasanya dikarenakan factor kesulitan ekonomi. Namun pada sisi psikologis, prostitusi adalah bentuk dari kelainan mental yang hanya dapat terhenti atas kesadaran dari pelakunya saja. Dampak negative dari prostitusi ini tentu saja mengenai penyakit-penyakit sosial lainnya yang berkembang di dalamnya, mulai dari miras, narkoba, judi, hingga penularan penyakit HIV/AIDS. Dan di Kota Blitar hal ini yang perlu mendapat penanganan lebih karena merupakan populasi yang turut menularkan HIV/AIDS kepada para pelajar dan remaja.

- **LGBT**

LGBT adalah Lesbian yaitu seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain, Gay yaitu seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering dipakai untuk menggambarkan homoseksual, Biseksual yaitu orang tertarik kepada pria dan perempuan, dan Transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan perempuan atau berbeda dengan biasa ditulis dokter di sertifikat kelahiran. Yang dikhawatirkan adalah "virus" ini menyebar ke anak dan remaja. Dan hal ini sudah ada di Kota Blitar.

- Perilaku seks menyimpang yang pernah ditemukan di Kota Blitar antara lain kasus sodomi bahkan dilakukan oleh pelajar SD, Kasus Bapak menghamili anak kandungnya. Hal ini sangat membuat miris bagi kita semua.

➤ *Pencegahan Penyakit Sosial*

1. Di Lingkungan Keluarga

Upaya pencegahan perilaku penyakit sosial di rumah memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan

kedudukannya masing-masing di keluarga. Dalam hubungannya dengan upaya pencegahan penyakit sosial di lingkungan keluarga, dapat melakukan beberapa hal, seperti berikut ini.

- a. Menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan penuh rasa kekeluargaan antar anggota keluarga.
- b. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah.
- c. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak.
- d. Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan.
- e. Memberikan punishment and reward, artinya bersedia memberikan teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah dan bersedia memberikan pujian atau bahkan hadiah jika anak berbuat baik atau memperoleh prestasi.
- f. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai tingkat umur dan pendidikannya.

2. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pergaulan anak yang cukup kompleks. Di dalam hal ini, kedudukan pendidik di lingkungan sekolah memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyakit sosial. Berbagai hal yang dapat dilakukan guru selaku pendidik dalam upaya mencegah perilaku penyakit sosial anak didiknya, antara lain, berikut ini.

- a. Mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang.

- b. Menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral, dan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- c. Selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, dan saling percaya.
- d. Memberi kebebasan dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi diri, sejauh potensi tersebut bersifat positif.
- e. Bersedia mendengar keluhan siswa serta mampu bertindak sebagai konseling untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik yang dihadapinya di sekolah atau yang dihadapinya di rumah.

3. Di Masyarakat

Lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat mampu mempengaruhi pola pikir seseorang. Dalam hal ini, perlu tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik. Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan perilaku penyakit sosial dapat tercapai, antara lain:

- a. Mengembangkan kerukunan antarwarga masyarakat, untuk meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan kekompakan antarsesama warga masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tercipta kekompakan, maka perilaku penyakit dapat diminimalisir.
- b. Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seperti tamu bermalam harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

c. Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti perkumpulan PKK, Karang Taruna, pengajian, atau berbagai kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok pelaku penyakit sosial akan merasa risih dan jengah, sehingga mereka akan merasa malu jika melakukan tindakan penyakit sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

4.2. Dampak Terganggunya Ketahanan Keluarga

Terganggunya ketahanan keluarga atau keluarga yang rentan berakibat antara lain:

1. Terganggunya proses tumbuh kembang anak-anak.
2. Tidak tercapainya tujuan pembentukan keluarga yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin.
3. Terganggunya kehidupan sosial masyarakat.
4. Dan yang paling terimbas jika hal ini terus dibiarkan adalah terganggunya stabilitas nasional baik dari segi kesejahteraan maupun ketentraman dan ketertiban umum serta masa depan bangsa dan negara.

4.3. Kondisi Kota Blitar Terhadap Komitmen Kota Blitar Sayang Keluarga

a. Komitmen Kepala Perangkat Daerah

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 13 Kepala Perangkat Daerah Kota Blitar dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk pertanyaan kepada Kepala OPD tentang bagaimana pendapat Saudara terkait Kota Blitar darurat krisis identitas keluarga yang menyebabkan

banyaknya penyakit sosial (kasus narkoba, HIV/Aids, LGBT, Pelecehan sexual, hamil diluar nikah, pernikahan di bawah umur) diperoleh data sebagai berikut:

NO	Jawaban	Jumlah
1.	Setuju	11
2.	Belum Mengarah ke sana	1
3.	Yang Lainnya: Ragu, belum percaya	1

secara garis besar bahwa kepala OPD menyadari bahwa di Kota Blitar terjadi krisis identitas keluarga. Ada 1 yang ragu dan ada 1 yang menganggap belum krisis tetapi waspada.

2. Pertanyaan terhadap OPD tentang program unggulan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya guna menguatkan ketahanan keluarga di Kota Blitar antara lain:

NO	Jawaban	Pelaksana
1.	Melakukan razia kost2an	Satpol PP
2.	Mengadakan sosialisasi tentang kesehatan, ketahanan keluarga	Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB
3.	Pembinaan mental spiritual, TPQ	Dinas Pendidikan
4.	Penguatan RT/RW	Kecamatan
5.	Kerjasama untuk pembinaan calon pengantin kemudian pembekalan lanjut oleh KUA Kota Blitar	Dinas Kesehatan
6.	Himbauan pada saat pengurusan ijin keramaian, serta informasi agar masyarakat melaporkan kepada pihak Polresta jika ada tontonan yang kurang etis	Polresta Blitar

Sesuai kewenangannya, masing-masing OPD telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tupoksi, Namun mengapa tidak dapat mengurangi angka penyakit

sosial ini, maka hal ini yang perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi lebih intensif antar Perangkat Daerah.

b. Pemahaman Masyarakat Pemilik Cafe, Warnet terhadap perannya dalam mewujudkan Kota Blitar Sayang Keluarga

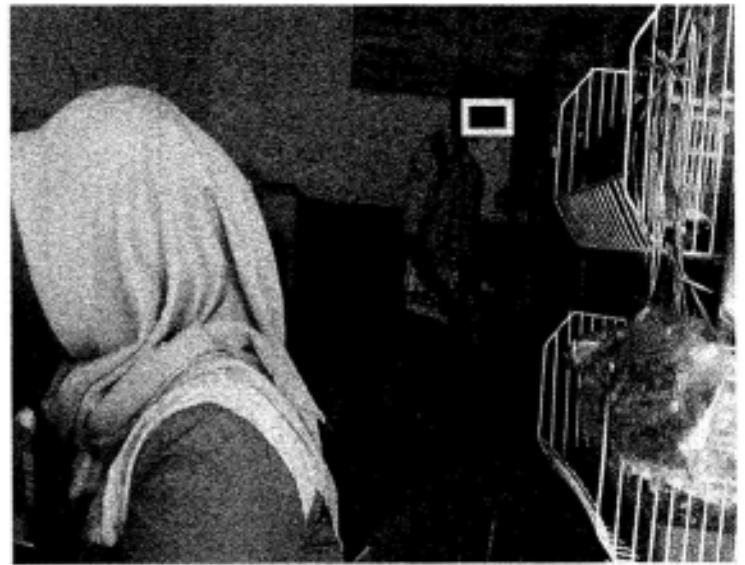
Dari hasil wawancara kepada beberapa pemilik café atau pemilik warung, bahwa mereka ikut mendukung dalam mengingatkan pada saat ada pelajar yang datang saat jam sekolah untuk segera kembali ke sekolah atau sekedar menanyakan apakah ada jam bebas di sekolah. Namun dari pengalaman Bapak/Ibu guru yang melaksanakan penjemputan siswa di salah satu warnet, ada beberapa yang melindungi akun siswa dan tidak memperkenankan guru untuk menjemput siswa dimaksud. Ada beberapa usulan para pemilik warnet/café/karaoke:

3. agar dibuat aturan terkait pengaturan yang memuat operasional warnet/café/karaoke.
4. Dilakukan razia ke warnet yang menyediakan konten-konten negatif

DOKUMENTASI
LOKASI DI WARUNG/CAFE YANG SERING DIGUNAKAN NONGKRONG OLEH
PELAJAR



SUASANA DI LOKASI WARUNG INTERNET DI KOTA BLITAR YANG SEBAGIAN
BESAR ADA PELAJARNYA





SUASANA DI TAMAN KOTA BLITAR



BAB V

RENCANA AKSI/ STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA

5.1. MANAJEMEN STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA

Sebelum merinci terkait manajemen Strategi Kota Blitar Sayang Keluarga, ada beberapa rincian indikator kinerja yang menjadi focus Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan Kota Blitar Sayang Keluarga ini antara lain:

No	Indikator	Target			Harapan Kinerja Positif	Data Dasar	
		Standar Nasional I/Prov	Kota 2021	Satuan		2016	2017
1	Angka kemiskinan (Po)	6	6,28	%	Menurun	7,18	8,03
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,1	3,5	%	Menurun	3,39	3,76
3	Angka kematian bayi (AKB)	23	9,92	per 1.000 Kelahiran hidup	Menurun	9,92	10,91
4	Angka kematian balita (AKBa)	32	32	per 1.000 kelahiran hidup	Menurun	0,92	10,91
6	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	102	102	per 100.000 kelahiran hidup	Menurun	236,18	0
7	Prevalensi balita kekurangan gizi	15	15	%	Menurun	7	0,31
8	Angka partisipasi kasar	100	100	%	di atas 100%	>100	172,32
9	Angka partisipasi murni	100	94,26	%	100%	93,52	94,59
10	Angka melek huruf	100	100	%	100%	97,65	100
11	Angka putus sekolah	5	0	%	0	0	0
12	Indeks Minat Baca	NA	48	Nilai Indeks	Meningkat	NA	49
13	Akses sanitasi layak	81,8	81,8	%	100%	98,1	100
14	Akses air minum layak	75	75	%	100%	78	81,3
15	Indeks Pencemaran Udara	NA	99	Nilai indeks	Menurun	96	85
16	Indeks Pencemaran Air	NA	57	Nilai indeks	Menurun	45	50
17	Usia Kawin Pertama			tahun	Meningkat		
18	Kasus Narkoba	0	0	kasus	Menurun	23	20
19	Angka kriminalitas	0	0	kasus	Menurun	330	252
20	Angka Perceraian	0	0	kasus	Menurun	91	174
21	Kasus KDRT	0	0	kasus	Menurun	19	13
22	Kasus Kesehatan Reproduksi Usia Sekolah	0	0	kasus	Menurun	14	73
23	Kasus HIV/AIDS	0	0	kasus	Menurun	112	134
24	Jumlah kasus ODGJ			kasus	Menurun		
25	Angka Kematian karena			kasus	Menurun		

No	Indikator	Target			Harapan Kinerja Positif	Data Dasar	
		Standar Nasional /Prov	Kota 2021	Satuan		2016	2017
	Penyakit Menular (PM)						
26	Angka Kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM)			kasus	Menurun		
27	Jumlah Psikotik Bebas Pasung			jiwa	Menurun	21	17
28	Partisipasi Masyarakat akses layanan posyandu				Meningkat		
29	Jumlah warga yang BAB di sungai			jiwa	Menurun		
30	Persentase 10 besar penyakit						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	10.						
31	Persentase bayi eksklusif ASI			%	Meningkat		78,11
32	Jumlah pekerja anak	0	0	jiwa	Menurun	0	0
33	Jumlah PMKS	NA	11.227	jiwa	Menurun	12.331	12.490
34	Luasan Kawasan rawan kumuh	NA	5,56	ha	Menurun	12,58	12,08
35	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	NA	0	rumah	Menurun	1625	1200
36	Angka Pelanggaran Lalu Lintas			kasus	Menurun		
37	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kendaraan	NA		kendaraan	Meningkat		
38	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan			%	Meningkat		
39	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum			%	Meningkat		
40	Jumlah Sekolah Adiwiyata	NA	215	sekolah	Meningkat	24	62
41	Jumlah sekolah ramah anak			sekolah	Meningkat		
42	Persentase RTH	20		%	Meningkat		

No	Indikator	Target			Harapan Kinerja Positif	Data Dasar	
		Standar Nasional I/Prov	Kota 2021	Satuan		2016	2017
43.	Jumlah Mata Air Yang terlindungi			mata air	Meningkat		
44.	Persentase rata-rata penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	NA	92	%	Meningkat	107	89,51
45.	Jumlah Publikasi informasi tentang masyarakat yang dipublikasikan	NA		publikasi	Meningkat		
46.	Angka Pola Pangan Harapan Konsumsi	92,5	85	skor	Meningkat	80,4	81
47.	Angka Pola Pangan Harapan Ketersediaan	96,32	86	skor	Meningkat	81,7	82

Sumber: data diolah hasil FGD, 2018

Kota Blitar merealisasikan atau mewujudkan kota yang nyaman, aman sehingga menjadi kota yang kondusif bagi segala elemen masyarakat baik anak-anak, lansia, disabilitas, perempuan, laki-laki, yang sakit, yang sehat, yang keluarganya utuh, yang single parents, yang masih bujangan, lansia, maupun yang tidak mempunyai anak adalah dengan menyusun strategi. Manajemen perwujudan strategi sayang keluarga dapat meliputi beberapa aspek/bidang diantaranya adalah :

A. Bidang Kelembagaan

Dalam mewujudkan dan sarana memantau pelaksanaan strategi sayang keluarga, Pemerintah Kota Blitar perlu membentuk Tim atau Kelompok Kerja Sayang Keluarga. Tim Ini dapat berdiri sendiri atau melekat pada Tim yang sudah ada dengan fungsi yang didalamnya memiliki tujuan yang hampir sama.

Gambaran atau masukan Tim Kota Blitar Sayang Keluarga sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
	Tim Pembina	
1.	Penanggungjawab	Walikota Blitar
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Walikota Blitar
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4	Wakil Pengarah	Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kota Blitar
5	Ketua	Kepala Bappeda Kota Blitar
6	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan
		Kepala Dinas Kesehatan
		Direktur RSUD Mardi Waluyo
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Dinas Sosial
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Dinas Perumahan Rakyat
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan dan PTSP
	Tim Teknis :	
1	Ketua	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Blitar
2	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
		Pendudukdan Keluarga Berencana
3	Bidang Teknis	
A	Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	
	Koordinator	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada SatuanPolisi Pamong Praja
	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
		Kepala Seksi Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada DP3AP2KB
		Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan PBD
		Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Sub Bagian Humas pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
		Camat Sananwetan
		Camat Kepanjenkidul
		Camat Sukorejo
		Ketua Forum Kewaspadaan Dini Nasional (FKDN)
		Laporan Pengaduan Polresta Blitar
B	Bidang Pelayanan Pendidikan	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan
	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan e government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kepala Bidang Keselamatan Jalan / Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
		DewanPendidikan Kota Blitar
C	Bidang Pelayanan, Advokasi dan edukasi Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
	Anggota	Kepala Bagian program dan Kepegawaian RSUD Mardi Waluyo
		Kepala UPTD Puskesmas Sananwetan
		Kepala UPTD Puskesmas Kepanjenkidul
		Kepala UPTD Puskesmas Sukorejo
		Kepala BNN
		Kepala STIEKES
		Kepala Kemenag Kota Blitar

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
D	Bidang Pengendalian Media Sosial	
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
		Ketua Paguyuban Café, Warnet
E	Bidang Pelayanan Infrastruktur Ramah	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Anggota	Sekretaris Dinas Perhubungan
		Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
		Ketua Forum CSR
F	Bidang Kearifan Sosial	
	Koordinator	Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Kesra
	Anggota	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
		Kabid Pemberdayaan Sosial
		Camat Sananwetan
		Camat Kepanjenkidul
		Camat Sukorejo
		Ketua BAZ Kota Blitar

RENCANA AKSI KELEMBAGAAN

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Penyusunan Tim/ Pokja TARYANGGA	Bappeda	√		
2.	Penyusunan Rencana Kerja Tim/ Pokja TARYANGGA	Bappeda	√		
3.	Pembuatan Komitmen Bersama	Bappeda	√		
4.	Capacity Building Tim/ Pokja TARYANGGA	Bappeda	√		
5.	Pertemuan Rutin Tim/ Pokja TARYANGGA	Bappeda	√	√	√
6.	Evaluasi TARYANGGA	Bappeda	√	√	√

B. Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Pembuatan aturan/kebijakan (misalnya Perwali untuk kalangan OPD) pembatasan terkait pelaksanaan ijin keramaian, panggung hiburan, karnaval dll agar ramah anak (etika pakaian penyanyi, pemandu sorak dll) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Satuan Polisi Pamong Praja	√		
2.	Patroli/ Razia: - anak jalanan, - pengemis di tempat umum, - tempat kost, - warnet, - cafe, - tempat karaoke, - rusunawa, juga - taman-taman di Kota Blitar. Catatan: jika ada laporan pengaduan diharapkan segera menindaklanjuti, tidak menunggu adanya jadwal rutin razia	Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama pihak terkait (DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Polresta dll)	√	√	√
3.	Pembentukan Tim Evaluasi dan Penertiban Kafe, Karaoke, Tempat Hiburan, Warnet, Anak Jalanan, tempat kost, dan tempat layanan umum.	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√
4.	Penertiban ijin pendirian cafe (mempersyaratkan klausul jam buka bagi pelajar serta jam malam, persyaratan pelajar datang	DPM Naker dan PTSP, Satuan Polisi Pamong Praja	√		

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
	ke warnet dan café pada saat jam sekolah)				
5.	Pembinaan poskamling (pengaktifan dan motivasi)	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan PBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan	√	√	√
6.	Pembentukan paguyuban café/warnet dan koordinasi para pengusaha café/warnet untuk monev	DPMT&PTSP, Satpol PP, Dinas Perdagangan	√	√	√
7.	Penertiban jalur sepeda dari kendaraan bermotor	Polres Kota Blitar, Dinas Perhubungan	√	√	√
8.	edukasi tentang tertib lalu lintas dan kepemilikan SIM untuk pelajar	Dinas Perhubungan, Polresta Blitar	√	√	√
9.	Edukasi masyarakat tentang norma - norma, karena mulai adanya tren "Cuek" di masyarakat dengan urusan lingkungan di sekitarnya	Kecamatan, Dinas Sosial, Satpol PP	√	√	√
10.	Pemerintah Kota Blitar membuat kebijakan tentang peredaran miras (Peraturan Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP	√	√	
11.	Pembuatan aturan lingkungan terkait ketertiban umum (misal tamu asing lebih dari 2 hari wajib lapor Ketua RT, pemantauan usaha kost2 an dll) dan pengaktifan poskamling	Ketua RT/RW, LPMK, Tokoh Masyarakat (sosialisasi oleh Kecamatan dan Kelurahan)	√	√	√
12.	Penertiban balap liar	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	√	√	√
13.	Evaluasi ,pemantauan dan pembinaan Panti asuhan/ LKSA di Kota Blitar	Dinas sosial	√	√	√
14.	Pembekalan kepada pemuda dan Ketua RT/RW tentang	Bakesbangpol dan PBD, Kecamatan,	√	√	√

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
	Kewaspadaan dini masyarakat di masing-masing kelurahan atau bahkan lingkungan.	Kelurahan			
15.	Pembuatan database anak jalanan yang terintegrasi se Jawa Timur	Dinas Sosial/ Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√

C. Bidang Pelayanan Pendidikan

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA pelayanan Pendidikan adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Pelaksanaan program jam wajib belajar (18.30-19.30) <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perwali Tentang Juklak jam wajib belajar - Pembentukan Satgas Jam Wajib Belajar - Capacity building Satgas Jam Wajib Belajar - Sosialisasi Jam Wajib Belajar 	Dinas Pendidikan	√	√	√
2.	Penyusunan panduan mendidik anak bagi orangtua peserta didik baik dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Misal: <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Kegiatan Orangtua dalam menemani anak belajar sambil bermain di rumah - Cara Pengasuhan Orangtua di rumah - Buku pedoman parenting bagi lembaga PAUD 	Dinas Pendidikan	√	√	√
3.	Koordinasi rutin terkait perkembangan perilaku anak didik SMA/SMK di Kota Blitar	Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan Prov Jatim Cabang Kab/Kota Blitar	√	√	√

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
4.	Pendidikan Bela Negara bagi siswa/pelajar Kota Blitar	Bakesbangpol dan PBD	√	√	√
5.	Evaluasi/ Kajian Kebijakan 5 hari sekolah di Kota Blitar (salah satunya terhadap ketahanan tubuh dan psikologis anak)	Dinas Pendidikan	√		
6.	Evaluasi terhadap program pendidikan gratis terhadap ketahanan siswa baik kesehatan, psikologis, materi dll	Dinas Pendidikan, Bappeda	√		
7.	Evaluasi penentuan tujuan lokasi studytour yang dapat memberikan edukasi bagi siswaSD, SMP, dan SMA di Kota Blitar	Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur	√	√	√
8.	Pemberlakuan punishmen bagi razia anak bolos dll (misal kegiatan kerja bakti pembersihan sungai, dilibatkan dalam pembagian rastra, panti jompo dll) mungkin bisa berkolaborasi dengan DP3AP2KB atau Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan terkait pembinaannya	Satpol PP, Dinas Pendidikan	√	√	√
9.	Pelaksanaan pertemuan rutin orangtua, wali kelas, guru BK Evaluasi, sharing dan matching perkembangan pendidikan, perilaku anak/siswa antara di rumah dan sekolah.	Dinas Pendidikan (SD, SMP), Orangtua.	√	√	√
10.	Pengadaan call center atau call informasi bebas pulsa terkait info sekolah bebas dll (untuk penertiban pelajar yang ke warnet/warung pada saat jam sekolah, pemilik warnet / warung dapat menghubungi nomor tersebut)	Dinas Pendidikan	√	√	√

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
11.	Pembentukan Tim Sosialisasi terkait Stop Kekerasan Terhadap anak, Dampak Medsos, Penyakit sosial dll yang ada call center sehingga bisa mengisi di Dasa Wisma, PKK, dll	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	√		
12.	Sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait Stop Kekerasan Terhadap anak, Dampak Medsos, Penyakit sosial dll secara terintegrasi bagi semua OPD yang terkait.	Dikda, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik	√	√	√
13.	Lebih menenknakan pendidikan moral dan akhlak saat jam BK di sekolah dengan metode yang menarik	Dinas Pendidikan, sekolah	√	√	√
14.	Pembuatan dan pembagian stiker motivasi/ slogan belajar anak di rumah	Dinas Pendidikan, Bappeda, Kecamatan	√	√	√
15.	Gerakan Indonesia Strong From Home serta penguatan peran ayah/fathering dalam pendidikan keluarga	Lembaga Konsultasi Keluarga, Kecamatan	√	√	√
16.	Peningkatan nilai-nilai keagamaan (mentoring keputrian, menjadwalkan jam sholat dhuha dll)	Dinas Pendidikan	√	√	√
17.	Kelas Inspirasi bagi Pendidikan Dasar (dari orangtua, atau OPD dll)	Dinas Pendidikan	√	√	√

D. Bidang Pelayanan, Advokasi dan edukasi Kesehatan

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA Bidang Pelayanan, Advokasi dan edukasi Kesehatan adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Sosialisasi mengenai kesehatan (termasuk , penyakit sosial, Narkoba dll) kepada remaja dan juga orangtua.	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, PKK	√	√	√
2.	Pembinaan dan Sarana diskusi bagi penyandang penyakit sosial agar tidak menyebarkan virus kepada lainnya.	Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, P2TP2A	√	√	√
3.	Pembentukan call center / Pondok Konsultasi penanggulangan penyakit sosial	Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Sosial	√		
4.	Launching dan pembelajaran tentang permainan edukatif tentang kesehatan reproduksi dari tingkat SD dan masuk dalam muatan local pembelajaran sekolah.	Dinas Kesehatan	√		
5.	Revisi Perda tentang Penghapusan denda keterlambatan pengurusan akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√		

E. Bidang Pengendalian Media Sosial

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA Bidang Pengendalian Media Sosial adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Kebijakan/ Perwali tentang pengaturan jam dan pembatasan free wifi/hotspot	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	√	√	√
2.	Koordinasi dan pembinaan bagi media cetak, elektronik dll terhadap pemberitaan	Bagian Humas dan Protokol Setda	√	√	√

	yang ramah keluarga				
3.	Sosialisasi tentang Bijak mengelola Medsos dan dampak negatifnya	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kecamatan, Kelurahan	√	√	√
4.	Satu jam TV tidak bisa dinyalakan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,	√		

F. Bidang Pelayanan Infrastruktur Ramah

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA Bidang Pelayanan Infrastruktur Ramah adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Sosialisasi kepada konsultan kontruksi tentang penyusunan perencanaan kontruksi yang ramah anak, ramah lansia, ramah difabel	Dinas PU dan PR	√	√	√
2.	Sosialisasi tentang tata tertib dan penggunaan Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat	√	√	√
3.	Peningkatan pengelolaan dan pengamanan Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat	√	√	√
4.	Penambahan Tempat Sampah di Jalan Umum, Lokasi Wisata	DLH, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	√	√	√
5.	Penyediaan fasilitas perdagangan yang ramah keluarga (ruang laktasi, bermain, kamar mandi dll)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√	√
6.	Pembangunan fasilitas disabilitas, bermain anak, taman dll	Forum CSR	√	√	√

G. Bidang Kearifan Sosial dan Keagamaan dan Ketenagakerjaan

Adapun Rencana Aksi dalam TARYANGGA Bidang Kearifan Sosial adalah :

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Penyediaan rumah aman/ selter bagi PMKS sementara yang belum tertangani.	Dinas Sosial	√	√	√
2.	Penyusunan SOP penanganan PMKS Kota Blitar	Dinas Sosial	√		

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
3.	Menggalakkan subuh bersama dan wacana memberikan sarapan pagi dari donatur	Bag. Perekonomian Kesra, BAZ	√	√	√
4.	Pembinaan pada calon pengantin baik dari segi keagamaan, keterampilan mengelola dan menangani kesehatan keluarga, keterampilan pendidikan keluarga, keterampilan pengelolaan ekonomi keluarga, pembinaan manajemen stress/masalah keluarga dll.	Kecamatan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, DP3AP2KB	√	√	√
5.	Membuka permasalahan sosial pada waktu musrenbang	Kecamatan, Bappeda	√	√	√
6.	Pembinaan terhadap masyarakat terhadap bahaya Bank titil, rentenir dll	Dinas Koperasi dan UM, Kecamatan, Kelurahan	√	√	√
7.	Sosialisasi dan pembinaan keluarga rawan ekonomi tentang gaya hidup sesuai kebutuhan bukan keinginan	Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UM, Kecamatan, PKK, Karang Taruna	√	√	√
8.	Pembinaan dan Evaluasi rutin Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar termasuk sinkronisasi dengan Remaja Masjid, perkumpulan olah raga dll.	Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan, Kelurahan	√	√	√
9.	Pelibatan remaja dalam kegiatan hari besar misal Kerja bakti, Agustusan, bazaar jadul, hari besar keagamaan, dll	Ketua RW/RT, Kelurahan, Kecamatan	√	√	√
10.	Pembentukan group sesuai potensi lingkungan masing-masing (misal: Group Rampak Gendang, group sholawatan, Group bola volley, Bank Sampah dll)	Ketua RT/RW, LPMK, Tokoh Masyarakat dll (disupport Kecamatan dan Kelurahan)	√	√	√
11.	Pemantauan, pendekatan dan pembinaan terhadap keluarga	Ketua RW/RT bekerjasama	√	√	√

NO	KEGIATAN	Pelaksana	Tahun		
			2019	2020	2021
	rawan terdampak penyakit sosial	dengan Tokoh Masyarakat bias meminta bantuan (calling Dinas Kesehatan dan P2TP2A)			
12.	Pembentukan call center/ Pondok Konsultasi tenaga kerja Kota Blitar(yaitu melayani warga kota blitar yang membutuhkan pekerjaan dan dapat menyambungkan dengan penyedia tenaga kerja)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	√		

CONTOH PUBLIKASI MOTIVASI

- ❖ Pelaksanaan Jam Wajib Belajar (pembuatan poster, tata tertib, booklet juklat dan lain-lain)



- ❖ Penyusunan panduan mendidik anak bagi orangtua peserta didik baik dari tingkat PAUD, SD dan SMP.



- ❖ Contoh slogan/stiker yang dapat dipasang di rumah-rumah atau lingkungan





BAB VI
RENCANA MONITORING DAN EVALUASI
STRATEGI KOTA BLITAR SAYANG KELUARGA

Monitoring menurut WHO adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang ditemua dapat dicarikan solusi atau pemecahannya. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Monitoring evaluasi dilaksanakan melalui hasil laporan pelaksanaan strategi atau rencana aksi setiap tahun dari Perangkat Daerah terkait dengan indikator (indikator akan dievaluasi sesuai kebutuhan setiap tahun) sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Keterangan
1	2	3	4
1	Bidang Kelembagaan	Bagaimana peran tim/pokja Taryangga	dievaluasi setiap tahun
		Apakah Rencana kerja sudah tersusun dan dievaluasi	
		Capacity Building Tim/Pokja Taryangga	
2	Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Apakah program/kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana atau ada kendala	dievaluasi setiap tahun
3	Bidang Pelayanan Pendidikan	Apakah program/kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana atau ada kendala	dievaluasi setiap tahun
4	Bidang Pelayanan, Advokasi dan edukasi Kesehatan	Apakah program/kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana atau ada kendala	dievaluasi setiap tahun